

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
SEKSI PENAGIHAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH**

**RANGGA DIAN PRAMANA  
8105123240**



**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2014**

## **ABSTRAK**

*Rangga Dian Pramana 8105123240. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, November 2014.*

*Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran dan penjelasan dari hasil pekerjaan di Sudin 1 Jakarta Pusat yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah PKL itu sendiri serta untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.*

*Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat, beralamat di jalan Abdul Muis No.66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788 Jakarta Pusat. Sudin 1 Jakarta Pusat bergerak di pengelolaan pajak daerah yang berkaitan dengan pajak hotel, restaurant, reklame, parkir.*

*Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 23 Juni s.d. 23 Juli 2014 dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat pada pukul 7:15 s.d. 14:30 dan hingga pukul 15:00 pada hari Jum'at. Praktikan meng- input pelaporan wajib pajak, membuat kearsipan data Suku Dinas Pelayanan 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengikuti seminar Sosialisasi Perda Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame, serta membuat laporan teguran wajib pajak dan pemuktahiran data wajib pajak dalam pajak hotel, restoran, parker dan reklame.*

*Selama masa pelaksanaan, praktikan dibimbing oleh pegawai bagian penagihan, P3D, penetapan, penyelesaian sengketa pajak. Meski mengalami kendala, Praktik Kerja Lapangan tetap dapat kembali berjalan. Praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan yang dilakukan , sehingga dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.*

## LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada  
Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat  
Seksi Penagihan Dan Penetapan Pajak Daerah

Nama Praktikan : Rangga Dian Pramana

Nomor Registrasi : 8105123240

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi



Dr. Siti Nurjanah, S.E, M.Si

NIP. 197201141998022001

Dosen Pembimbing



Santi Susanti, S.Pd,M.Ak

NIP. 197701132005012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi & Administrasi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 196610302000121001

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada  
Dinas Pelayanan Pajak Dki Jakarta Unit  
Penagihan Suku Dinas Pelayanan Pajak 1  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nama Praktikan : Rangga Dian Pramana

Nomor Registrasi : 8105123240

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Ketua Jurusan Ekonomi & Administrasi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 196610302000121001

Nama

Tanda Tangan

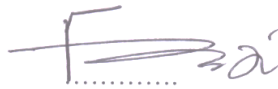
Tanggal

Ketua Penguji

Achmad Fauzi, S.Pd.,M.Ak.

NIP. 197705172010121002

Sekretaris



02 Desember 2014

Susi Indriani, M.S.Ak.

NIP. 197608202009122001

Dosen Pembimbing



02 Desember 2014

Santi Susanti, S.Pd,M.Ak

NIP. 197701132005012002



02 Desember 2014



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur dan puji alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berharganya pelajaran yang telah diperoleh serta informasi ilmu pengetahuan yang didapat menjadi sebuah tantangan yang menjadi motivasi untuk praktikan dalam proses penyusunan Laporan Praktik Kerja. Ungkapan terima kasih praktikan tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan kepada praktikan.

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya;
2. Orangtua yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat;
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E. S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Bapak Drs.Nurdin Hidayat,MM.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
5. Bapak Dr. Saparuddin M,M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
6. Ibu Santi Susanti, S. Pd., M. Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait PKL;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang

telah memberi bimbingan dan semangat kepada praktikan;

8. Bapak Andri Divisi Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan;
9. Bapak Arief Susilo, SH, M.Si. Selaku Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Ibu Umiyati, SE, MM selaku Kepala Seksi Penagihan Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memberikan pengarahan dan bimbingan pada bagian penagihan;
11. Bapak Abdul Rachman, S.Sos selaku Kepala Seksi P3D;
12. Bapak Asif Kurniawan, S.Sos selaku Kepala Seksi Penetapan;
13. Bapak Supriyadi, S.Sos selaku kepala Seksi Sengketa Pajak;
14. Seluruh karyawan Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; serta
15. Teman-teman baik di kelas maupun luar kelas Pendidikan Akuntansi Reguler 2012 FE- UNJ atas segala dukungan.

Dalam setiap hal kehidupan ini terdapat kebaikan dan kekurangan, layaklah Laporan PKL ini maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Semoga Laporan PKL ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, November 2014

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL.....	3
C. Kegunaan PKL .....	4
D. Tempat PKL .....	5
E. Jadwal Waktu PKL .....	5
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL</b>	
A. Sejarah Perusahaan.....	8
B. Struktur Organisasi.....	16
C. Kegiatan Umum Perusahaan .....	23
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN</b>	
A. Bidang Kerja .....	25
B. Pelaksanaan Kerja .....	26
C. Kendala Yang Dihadapi .....	28
D. Cara Mengatasi Kendala .....	30

#### **BAB IV KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	32
B. Saran-saran .....	34

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan PKL .....	36
Lampiran 2	Surat Persetujuan PKL .....	37
Lampiran 3	Daftar Hadir PKL.....	38
Lampiran 4	Daftar Hadir PKL.....	39
Lampiran 5	Penilaian PKL .....	40
Lampiran 6	Jadwal PKL .....	41
Lampiran 7	Struktur Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta .....	42
Lampiran 8	Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat.....	43
Lampiran 9	Logo.....	44
Lampiran 10	Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	45
Lampiran 11-22	Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak.....	46-57
Lampiran 23	Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan.....	58
Lampiran 24	Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan .....	59
Lampiran 25	Font SSPD .....	60
Lampiran 25	Font SPPTPD Hiburan .....	61
Lampiran 26	Excel Tunggakan.....	62
Lampiran 27	Excel Monitoring .....	63
Lampiran 28	Rekalame.....	64
Lampiran 29-31	Sistem Informasi Manajemen Reklame .....	65-67
Lampiran 32	Rekapitulasi Hasil Akhir Wajib Pajak.....	68
Lampiran 33	Perda Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusata.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional, dimana pembangunan tersebut dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur kebijakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945. Pengelola penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan dan memperdayagunakan kinerja pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Sumber daya daerah memiliki potensi tersendiri dalam memberi peluang daerah untuk mengelolanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang madani dan mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tersebut berpeluang untuk membuat suatu kelembagaan yang dinaungi oleh hukum dan Undang-undang, kelembagaan ini akan menjadi alat kelengkapan pemerintah dalam mengelola sumber daya pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah, maka daerah membentuk lembaga pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan dan melakukan pengawasan terhadap retribusi pajak daerah terhadap negara.

Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, sehingga fungsi pemerataan daerah di Indonesia dapat terkondisikan. Lembaga-lembaga akan berjalan dengan baik dan terarah ketika terdapat elemen sumber daya skill yang mengelolanya, maka sebagai akademisi Praktikan mengaplikasi hal ini, guna mempersiapkan tuntutan di era global yang terbuka dan bebas bertanggung jawab ini, untuk dapat terlibat dalam dunia kerja. Praktikan memiliki kontribusi awal dalam partisipasi pembangunan daerah.

Melalui Universitas Negeri Jakarta Praktikan belajar untuk mengimplementasikan sarana dalam upaya memenuhi aspek dunia kerja yang dibutuhkan pemerintah daerah. Kebutuhan dunia kerja inilah yang mendorong Praktikan terjun ke dunia kerja, secara praktik awal melalui yakni Praktik Kerja Lapangan atau yang lebih dikenal dengan istilah PKL. Kondisi Praktik Kerja Lapangan sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih komprehensif mengenai dunia kerja. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik di lapangan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing.

Program tersebut pun memberi kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini jelas untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja, yang Program Praktik Kerja Lapangan dilakukan oleh setiap mahasiswa tingkat akhir baik secara individu (perorangan) maupun berkelompok. Praktikan sendiri melaksanakan program Praktik Kerja

Lapangan secara kelompok di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

Maksud dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta adalah

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu terkait bidang studi khususnya unit penagihan dan sengketa pajak saat melakukan Praktik Kerja Lapangan, yaitu pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Menambah pengalaman keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja; serta
3. Membandingkan teori di perguruan tinggi pada praktik di dunia kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, adalah:

1. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada pada kondisi nyata dalam perusahaan;
2. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori perkuliahan;
3. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman; dan



4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap di dunia kerja.

### **C. Kegunaan PKL**

Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program tersebut:

1. bagi mahasiswa, yakni:
  - a. sarana dalam melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan;
  - b. kegiatan belajar dalam mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja;
  - c. sarana pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sebelumnya guna menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal; serta
2. bagi Fakultas Ekonomi-UNJ, yakni memperoleh upaya penyempurnaan kerjasama dengan lembaga terkait guna membangun *link* pada dunia kerja untuk lulusannya; serta
3. bagi Dinas Pemerintah, yakni membangun kerjasama dengan pihak luar guna memperbaharui sistem sesuai dengan yang berkembang saat ini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja pada instansi.

#### **D. Tempat PKL**

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu Dinas Pemerintah, yaitu Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Praktikan ditempatkan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Lantai 2 Sudin 1 Jakarta Pusat Gedung Abdul Muis, Jakarta Pusat. Berikut adalah identitas lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan:

Nama Dinas : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta  
 Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi-  
 Jakarta Pusat  
 Alamat : Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat  
 Telepon : (021) 3865580-85  
 Faksimili : (021) 3865788  
 Website : [dpp.jakarta.go.id](http://dpp.jakarta.go.id)

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan pemilihan praktikan dalam melaksanakan program PKL pada perusahaan tersebut, yakni sebagai langkah implementasi ilmu selama di perkuliahan karena perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan pajak daerah yang menjadi pengelola pendapatan daerah. Oleh karena itu, praktikan tertarik untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai proses perpajakan yang dilakukan Sudin 1 Jakarta Pusat.

#### **E. Jadwal Waktu PKL**

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 Juli 2014. Dalam melaksanakan

praktik tersebut, waktu kerja praktikan ditentukan dan diatur oleh kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sedangkan untuk pembagian tempat divisi atau seksi praktikan melakukan kerja ditentukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin digunakan untuk Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pengajuan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Mei 2014 dan surat diambil pada tanggal 19 Mei 2014 di loket administrasi BAAK Universitas Negeri Jakarta, hal ini dikarenakan proses pengajuan surat membutuhkan waktu 2 hari. Selanjutnya, praktikan memberikan surat izin tersebut kepada bagian Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014.

Waktu yang dibutuhkan untuk konfirmasi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memerlukan waktu sehari, kemudian surat rekomendasi Dinas praktikan ajukan pada Sudin 1 Jakarta Pusat dengan lama konfirmasi penerimaan dan penempatan di Sudin 1 Jakarta Pusat selama sehari. Satu minggu setelah konfirmasi dengan Sudin 1 Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat

praktikan mendapat menataran untuk persiapan pada pertengahan Juni 2014 untuk mulai melakukan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 Juli 2014. Sesuai dengan kontrak perjanjian awal, jam kerja dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat pada pukul 07:15-15:30 WIB dan hari Jumat pada pukul 07:15-16:30 WIB. Pertepatan pada bulan ramadha maka waktu pulang di majuka 30 menit. Praktikan PKL di Sudin 1 Kota Administrasi Jakarta pulang praktik tentu sebab praktikan malakukan kegiatan yang memadai seperti kontribusi untuk persiapan seminar dan pembuatan pemuhktahiran data Wajib Pajak,

## 3. Tahap Pelaporan

Praktikan mulai melakukan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan sejak bulan Oktober 2014 hingga November 2014.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **A. Sejarah Dinas**

DKI Jakarta merupakan bagian dari daerah otonom yang memiliki kemandiri untuk dapat mengelola sumber daya asset baik itu pendapatan daerah guna pembangunan dan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Pengelolaan pemasukan daerah tersebut dapat berupa wadah kelembagaan yang sah menurut UU yang berlaku. Kegiatan di dalam lembaga tersebut berupa pemungutan dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Lembaga tersebut berupa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sejarah singkat Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah melalui beberapa proses sejarah yang cukup mendewasakan.

Kelembagaan tersebut untuk ikut andil dalam pembangunan daerah. Inilah alur sejarah DPP DKI Jakarta: Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 September 1952; Bagian Padjak (1956-1965); Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966; Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968; Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan Keputusan Gubernur

KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975; Dinas Pajak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976; dan dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.

Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan oleh Walikota. Di setiap Kota Administrasi dibentuk 2 Suku Dinas Pelayanan Pajak yaitu:

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat,
2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat,
3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan,
4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan,
5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat,
6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat,
7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara,

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara,
9. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur, serta
10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur.

Serta pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak sebagai berikut:

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat dengan wilayah kerja meliputi:
  - a. Kecamatan Tanah Abang;
  - b. Kecamatan Menteng;
  - c. Kecamatan Senen; dan
  - d. Kecamatan Johar Baru.
2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat dengan wilayah kerja meliputi:
  - a. Kecamatan Cempaka Putih;
  - b. Kecamatan Kemayoran;
  - c. Kecamatan Sawah Besar; dan
  - d. Kecamatan Gambir.
3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dengan wilayah kerja meliputi:
  - a. Kecamatan Mampang Prapatan;
  - b. Kecamatan Kebayoran Baru;
  - c. Kecamatan Kebayoran Lama;
  - d. Kecamatan Cilandak; dan

- e. Kecamatan Pesanggrahan.
4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Setiabudi;
  - b. Kecamatan Tebet;
  - c. Kecamatan Pancoran;
  - d. Kecamatan Pasar Minggu; dan
  - e. Kecamatan Jagakarsa.
5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Tamansari;
  - b. Kecamatan Tambora;
  - c. Kecamatan Cengkareng; dan
  - d. Kecamatan Kalideres.
6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Palmerah;
  - b. Kecamatan Grogol Petamburan;
  - c. Kecamatan Kebon Jeruk; dan
  - d. Kecamatan Kembangan.
7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Tanjung Priok;



- b. Kecamatan Pademangan; dan
  - c. Kecamatan Penjaringan.
8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Kepala Gading;
  - b. Kecamatan Koja;
  - c. Kecamatan Cilincing; dan
  - d. Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Kramat Jati;
  - b. Kecamatan Pasar Rebo;
  - c. Kecamatan Makasar;
  - d. Kecamatan Cipayung; dan
  - e. Kecamatan Ciracas;
10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Kecamatan Matraman;
  - b. Kecamatan Jatinegara;
  - c. Kecamatan Pulogadung;
  - d. Kecamatan Cakung; dan Kecamatan Duren Sawit.

Setiap UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya. Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki visi dan misi tersendiri dalam menjalankan pengelolaan pajak daerah. Tentu ini dilakukan agar meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta menumbuhkan komitmen terhadap kinerjanya untuk mengelola pajak daerah.

a. Visi dan Misi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat

Sudin 1 Jakarta Pusat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) Suku Dinas yang mewakili setiap pemungutan pajak daerah di setiap kota administrasi Dinas Pelayanan Pajak DKI.

1. Visi Perusahaan

Menjadi DIPENDA sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

2. Misi Perusahaan

2.1 Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah; dan

2.2 Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemungutan pendapatan daerah.

3. Motto Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat

“Berikan Pelayanan Terbaik Pasti Pendapatan Daerah Pasti Meningkat”.

b. Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta layaknya logo daerah Jakarta, hal ini dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta merupakan bagian dari dinas yang beroperasi dibawah komando Gubernur Jakarta, sehingga instansi terkait memiliki hubungan berupa Dinas yang mengelola pajak daerah berupa pungutan pajak daerah. Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan gerbang terbuka. Didalamnya terdapat gerbang terbuka, sehingga nampak tugu nasional yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas.

Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut. Pinggiran Perisai digaris tebal dengan warna emas, gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka “Jaya Raya” yang tertulis diatasnya berwarna merah, tugu nasional berwarna putih, untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) kapas berwarna hijau serta putih, ombak-ombak laut berwarna dan dinyatakan dengan garis-garis putih, kesemuanya ini dilukiskan atas dasar yang berwarna biru.

Makna dari atribut tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan Indonesia, jakarta sebagai Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka).

Kekhususan kota Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan tugu nasional yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. Tugu Nasional ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan Bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar warna biru, warna angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta damai bangsa Indonesia dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu tertera dengan kemegahan yang sederhana sloka Jaya Raya satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan. Jakarta Raya sebagai Ibu-kota dan kota perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara Pancasila.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber : Perda No. 6 Tahun 1963 dan Perda No. 9 Tahun 1964

## **B. Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak**

Dinas Pelayanan Pajak merupakan pelaksana Pemerintah Daerah yang diberikan tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan pelayanan pajak daerah serta melaksanakan koordinasi pelayanan pajak daerah sesuai dengan kewenangan Suku Dinas. Peran utama dari tiap satuan kerja organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut

### **1. Tugas Pokok**

Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. Dimana Kepala Suku Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah atau instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas.

### **2. Fungsi**

Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat terdiri dari berbagai subbidang atau seksi yang masing-masing memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, hal ini dilakukan guna untuk dapat memfokuskan kinerja dari setiap subbagian tersebut.

**a. Bagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha Melaksanakan administrasi suku dinas, dimana TU mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja Dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas, melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang, melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan, melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor, melaksanakan upacara dinas, pengaturan acara dan publikasi kegiatan suku dinas, melaksanakan pengelolaan ruang rapat suku dinas, melaksanakan implementasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan pajal daerah, melaksanakan evaluasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan pajak daerah, memberikan pelayanan penyuluhan terhadap wajib pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan pelayanan pajak pada kota administrasi/kabupaten administrasi,

mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) suku dinas, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

**b. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak (P3D)**

Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pendaftaran dan penatausahaan pajak daerah. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, meneliti, dan menatausahakan permohonan pendaftaran wajib pajak melaksanakan pendataan dan pengawasan wajib pajak, menyusun buku induk pajak daerah pada lingkup kota administrasi, menerbitkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk jenis pajak daerah yang pajaknya ditetapkan, menerima dan memproses perizinan tertentu di bidang pajak daerah, mengusulkan penerbitan, pencabutan, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan, dan penagihan pajak daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak, serta menyiapkan bahan laporan.

**c. Seksi Penetapan Pajak**

Seksi Penetapan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penetapan pajak daerah. Seksi Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan



Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang, menerima, mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda masuk/karcis dan dokumen lain yang dipersamakan, menyusun rencana penerimaan pajak daerah, menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Pajak.

**d. Seksi Penagihan Pajak**

Seksi Penagihan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah, melakukan penagihan pajak dengan surat paksa, membuat daftar himpunan pembayaran dan dan piutang pajak daerah, menyusun daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan yang akan dihapuskan, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan dan penagihan pajak daerah, membuat salinan surat ketetapan pajak daerah, menerima dan memproses pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak daerah, memproses dan mengadministrasikan pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan, membuat usulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, melakukan koordinasi dengan unit instansi terkait dalam rangka penagihan pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak.

**e. Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak**

Seksi Penyelesaian Sengketa merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, mengadministrasikan dan memproses permohonan pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan denda) pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, mengadministrasikan keputusan mengenai pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan denda pajak daerah), menerima dan memproses permohonan keberatan pajak, mempersiapkan surat uraian banding atas permohonan keberatan pajak daerah, membuat dan melaporkan risalah dan keputusan keberatan, menerima dan memproses penyelesaian gugatan wajib pajak, menerima dan memproses sanggahan dari wajib pajak, menerima dan memproses permintaan peninjauan kembali, melakukan proses pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, menghadiri persidangan penyelesaian sengketa pajak, menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak.

### **C. Kegiatan Umum Dinas Pelayanan Pajak**

Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai beberapa kegiatan, yaitu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pelayanan Pajak, pelayanan pemberian informasi dan pendaftaran wajib pajak, pendataan dan penatausahaan wajib pajak, pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah, penetapan jumlah kewajiban pajak daerah yang harus dibayar wajib pajak, penagihan pembayaran kewajiban pajak daerah yang harus dibayar wajib pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah, pelaksanaan koordinasi pelayanan pajak daerah pada lingkup kota administrasi.

Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang berkaitan dengan pelayanan pajak pada kota administrasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas, pelaksanaan kegiatan kerumahtangga dan ketatausahaan suku dinas, pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara suku dinas pelayanan pajak, penyediaan, penatausahaan,

penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas, penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak.

Apabila terdapat utang pajak yang belum tertagih maka Dinas Pelayanan Pajak berhak melakukan penagihan utang tersebut menggunakan surat paksa. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, penyanderaan, menjual barang yang disita.<sup>2</sup> Surat paksa diterbitkan apabila ditemukan seorang wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepada si wajib pajak tersebut sudah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak juga tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, dan juga apabila wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

---

<sup>2</sup> UU no 19 tahun 2000

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Bidang Kerja**

Selama masa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat di bidang penagihan, kedisiplinan, keramah tamahan dan ketepatan menjadi hal yang dituntut oleh Sudin 1 Jakarta Pusat bagi praktikan. Pada kegiatan tersebut, praktikan tidak hanya berada ditempatkan seksi Penagihan dan Penetapan Pajak Daerah namun pada kesempatan yang telah terjadwalkan praktikan membantu pada bagian TU, P3D (Pendaftaran dan Pentatausahaan Pajak), dan Sengketa Pajak. Penjadwalan pada setiap seksi telah disesuaikan dengan keputusan Sudin 1 Jakarta Pusat, serta pembagian ini didasari sumberdaya skill yang kurang memadai sehingga praktikan tidak hanya fokus pada satu bidang penagihan saja tetapi 5 (lima) seksi di Suku Dinas Pelayanan Pajak kota Administrasi Jakarta Pusat, namun praktikan fokus pada seksi penagihan.

Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Meng-*input* data pemukhtahiran wajib pajak dalam rangka penyusunan laporan pendapatan tahun 2013;
- b. Mengklasifikasikan data penyetoran wajib pajak pada database di

Sistem Pemungutan Pajak Daerah menggunakan akun pegawai tetap

Sudin 1 Jakarta Pusat;

- c. Membuat telaah data pendaftaran dan proses wajib pajak pada P3D;
- d. Membuat penetapan Pajak serta mengolah data wajib pajak untuk mengajukan keringan pajak serta menetapkan denda atau besaran pajak; serta
- e. Mencetak data porporasi kegiatan *event*, hotel dan restoran.

## **B. Pelaksanaan Kerja**

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2012 hingga 31 Juli 2012. Pada awal masa kerja, praktikan diberikan arahan mengenai tata tertib dan peraturan Dinas serta bimbingan mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh praktikan selama masa PKL. Kepala Seksi bagian Tata Usaha memberi penjelasan kepada praktikan mengenai tugas yang akan dikerjakan selama masa kerja PKL, sebagai langkah awal untuk memasuki atau praktik di seksi Penagihan. Tugas tersebut memberikan gambaran bagi praktikan mengenai alur masuk hingga proses wajib pajak dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pengarahan kepala Seksi Penagihan memberikan gambaran tugas yang dilakukan oleh bagian penagihan, yang salah satunya memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap wajib pajak baik restoran, parkir, hiburan, dan hotel, untuk reklame sendiri dilimpahkan pada bagian P3D. Dalam mencapai

maksud dan tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berupaya memahami setiap pekerjaan yang diberikan. Pemahaman tersebut ditujukan agar praktikan dapat mencapai keahlian (*skill*) yang harus dimiliki sehingga praktikan dapat melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan secara berkesinambungan untuk dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi. Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Meng-*input* dan Mencetak Data Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir Melalui Sistem Pemungutan Pajak Daerah SP2D sekaligus pengecekan lapor wajib pajak, karena sistem pembayaran online, praktikan hanya dapat mengecek dan memvalidasi apakah wajib bayar telah melakukan pembayaran dengan melihat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan SPPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sesuai dengan Subjek Pajaknya.

Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.<sup>3</sup> SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah merupakan bukti formulir telah melakukan pembayarn yang dilakukan perbulan, dimana SSPD yang harus disertai pula SPPTD sebagai kenali dari SSPD.

---

<sup>3</sup>Suandy Erly. *Hukum Pajak*. Online Situs



- b. Mengevaluasi dan memonitoring terhadap wajib pajak yang telah melakukan verifikasi telah melakukan pembayaran, ketikan sistem online pajak sedang dikembangkan. Disini Praktikan menggunakan Sistem Pemungutan Daerah. Dengan melihat data Wajib Pajak. Praktikan masuk pada sistem ini menggunakan akun unit penagihan
- c. Membuat laporan *monitoring* laporan realisasi pajak. Dalam proses pemeriksaan, seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal bertugas untuk melakukan *monitoring* jalannya pemeriksaan dan verifikasi terhadap unit-unit dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. Hal tersebut akan dibuat dalam laporan terkait WP aktif atau WP tutup dan teguran untuk tunggakan. *Monitoring* ini dibuat laporannya dalam format *Microsoft Excel*.
- d. Melakukan porporasi, Porporasi merupakan note atau tanda legal yang diberikan oleh Suku Dinas Pajak 1 Jakarta Pusat kepada WP untuk memonitoring dari hasil pajak yang akan diolah kembali jika terjadi perbedaan. Porporasi tersebut berupa tanda bintang pada bon.

### **C. Kendala yang Dihadapi**

Setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti akan menjumpai kendala. Begitu pula yang praktikan rasakan saat melakukan program PKL ini. Namun, kendala ini justru menjadi motivasi bagi praktikan untuk bisa memperoleh wawasan dan pengalaman yang lebih dalam kembali.

Kendala yang dihadapi praktikan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan antara lain :

1. Terbatasnya Pegawai Suku Dinas Pajak 1 Jakarta Pusat

Jumlah pegawai yang berstatus PNS Daerah atau honorer yang minim, membuat Praktikan harus berkerja terjadwal untuk dapat membantu memasuki semua unit di SUDIN 1 Jakarta Pusat.

2. Praktikan harus ikut semua aktifitas yang dilakukan SUDIN 1 Jakarta Pusat

seperti seminar perpajakan, buka puasa dan sebagainya yang dilakukan diluar jam kerja, sehingga Praktikan kurang maksimal dalam kinerja, hal ini juga disebabkan pada PKL dilaksanakan pada bulan puasa.

3. Masih awamnya Praktikan salah sistem Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat dalam hal input ataupun proses lainnya dalam pajak,

4. Jadwal kerja relatif padat

Aktifitas diluar kantor, seperti acara-acara SUDIN 1 Jakarta Pusat, membuat Praktikan kurang fokus terhadap pelaksanaan PKL.

5. Kurangnya wawasan yang mendalam terhadap dunia perpajakan

Teori perpajakan di bangku kuliah ternyata masih sangat kurang untuk bisa membantu praktikan memahami dunia perpajakan di dunia riil khususnya perpajakan daerah yang berkaitan dengan mekanisme pajak daerah itu sendiri.

#### **D. Cara Menghadapi Kendala**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Praktikan tersebut, maka langkah yang dilakukan Praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Praktikan berusaha membagi jadwal antar unit, pembagian ini telah berdasarkan kesepakatan dan konfirmasi Dinas. Sehingga Praktikan dapat menjalankan amanah dan dapat berkontribusi untuk memaksimalkan kerja di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. Cara yang digunakan kembali ketika pekerjaan Praktikan dalam satu unit telah terselesaikan dan masih dalam jam kerja secara langsung Praktikan membantu unit lainya;
2. Berusaha berkonsultasi dengan pembimbing Praktikan pada unit Penagihan terkait mekanisme seminar atau kegiatan lain, sehingga Praktikan dapat meminimalis kesalahan yang dibuat.
3. Dalam hal pengenalan sistem baru ataupun peraturan perpajakan daerah terkait pajak restoran, hotel, hiburan, parkir dan reklame, setiap yang merikan tugas selalu mengarahkan terlebih dahulu kemudian Praktikan secara mandiri melakukan tugas tersebut.
4. Praktikan berusaha menganalisis sendiri apa yang sedang dikerjakan oleh Praktikan, sehingga Praktikan mengetahui kebenarannya dari masalah yang dihadapi.
5. Teori yang didapatkan praktikan selama bangku kuliah hanyalah berpusat pada cara penghitungan saja. Namun, sebenarnya masih

banyak prosedural dari perpajakan sendiri yang belum diketahui oleh praktikan. Sehingga praktikan banyak melakukan eksplorasi dengan melakukan studi pustaka baik melalui buku ataupun browsing di internet dan juga banyak bertanya dengan pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat terutama pada unit Penagihan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana penunjang yang diberikan perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan akademisi untuk siap terjun ke dunia kerja. Program Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang Sarjana sebagaimana tuntutan dalam SKS. PKL ini praktikan memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan daerah. Terutama dalam kegiatan harian praktikan, seperti meng-*input* dan mencetak wajib pajak dan melakukan monitoring terhadap pendaftaran, penetapan hingga pemberian sanksi dan keringanan bunga telat bayar pada pajak daerah khususnya Kota Administrasi Jakarta Pusat 1.

Praktikan banyak memperoleh pengetahuan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL telah terlaksanakan. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat:

1. praktikan dapat mengetahui dan menjalankan aplikasi Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan Sudin 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengelola data masukan wajib pajak baik itu pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan parkir;

1. praktikan dapat mengetahui berbagai macam penetapan pajak baik restoran, hotel, parkir, hiburan, dan reklame serta mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pendapatan daerah tersebut;
2. dalam praktiknya praktikan dapat mengetahui proses porporasi yang digunakan untuk mengawasi besaran pajak dari masing-masing wajib pajak. Porporasi ini dilakukan sebelum adanya sistem online pengendalian pajak yang sedang diterapkan secara berkala;
3. praktikan dapat mengetahui prosedur penagihan pajak, semua ini dimonitoring dari sistem dan observasi pengawas Sudin 1 kepada wajib pajak;
4. praktikan dapat mengetahui prosedur telaah hingga turun SK peringatan bunga sanksi atau pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Sudin 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. praktikan dapat mengetahui wajib pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan parkir dan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. dengan adanya monitoring secara langsung, praktikan belajar kesolidan tim dalam mengemban amanah negara untuk mengelola pendapatan daerah;
7. dalam organisasi tentu terdapat struktur dan prosedural dalam perpajakan sehingga praktikan dapat mengetahuinya dalam 1 (satu) bulan; serta

8. praktikan dapat belajar tentang tanggungjawab dan kedisiplinan dalam dunia kerja, terutama di instansi pemerintah daerah.

## **B. Saran-saran**

Dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut;

- a. bagi Mahasiswa, yakni:
  1. Mencari tempat PKL yang sesuai dengan ilmu yang di dapat dibangku perkuliahan, akan membawa berbagai dampak yang positif seperti timbulnya suatu pengalaman dari pemraktikan teori di kampus;
  2. Mahasiswa dapat memproses ajuan keperluan atau dinas dengan jangka waktu yang memadai;
  3. Peserta PKL harus dapat mempersiapkan diri baik administrasi ataupun fisik untuk dapat menempuh keberhasilan PKL ini;
  4. Mengulang atau mempelajari kembali materi dan teori yang masih berkaitan dengan praktik di lapangan;
  5. Melaksanakan setiap tugas dengan baik, tanggung jawab, disiplin serta dapat berkomunikasi dengan baik dan benar ke lembaga; serta
  6. Perpenampilan sopan, disiplin tinggi, hingga menjaga nama baik almamater.

b. bagi perguruan tinggi, yakni:

1. dapat menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa dan dapat menunjang gambaran karir mahasiswa untuk dapat bersaing di dunia kerja;
2. melaksanakan Praktik Kerja Lapangan haruslah dengan bimbingan yang terarah terhadap perkembangan mahasiswa; serta
3. sosialisasi tahap awal persiapan PKL, sehingga terdapat kematangan apa yang harus dipersiapkan hingga dilaksanakan di tempat PKL.

c. bagi dinas, yakni:

1. meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, satuan kerja perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar perusahaan;
2. meningkatkan kualitas layanan berupa sistem yang lebih transparan;
3. pemperketan kembali terhadap para wajib pajak;



## DAFTAR PUSTAKA

Dpp.Jakarta.go.id


Perda No. 6 Tahun 1963

UU No. 19 Tahun 2000

Suandry Erly. *Hukum Pajak*. Jurnal

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Permohonan PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,  
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
 Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486  
 Laman : www.unj.ac.id

---

Nomor : **3114/UN39.12/KM/2014**

**19 Mei 2014**

Lamp. : 1 lembar

H a l : **Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan**

---

**Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**  
**U/P Sudin Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat**

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


Jurusan	: Ekonomi dan Administrasi
Fakultas	: Ekonomi
Sebanyak	: 3 Orang (Ricky Dharmawan S, dkk) Daftar Nama Terlampir.
Untuk Mengadakan	: <b>Praktek Kerja Lapangan</b>
Dalam Rangka	: Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
No. Telp/HP	: 08999289740

Di : **Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt.9,**  
**Jl. Abdul Muis, No.66, Gambir, Jakarta Pusat 10160**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Tembusan :**


1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi



Kepala Biro Administrasi  
 Akademik dan Kemahasiswaan,

*[Signature]*  
 Drs. Syaifullah  
 NIP 195702161984031001

## Lampiran 2 Surat Persetujuan PKL



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELS. (021) 3865580 - 85  
 JAKARTA PUSAT

---

Nomor : 636 /-082 30 Mei 2014  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan izin Pendidikan Sistem Ganda / Magang Kepada : Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat  
 di : Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta 3114/UN39.12/KM/2014 perihal Permohonan Praktek Kerja Siswa, yang namanya tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	NOMOR INDUK
1.	Rangga Dian Pramana	8105123240
2.	Ricky Dharmawan Samsu	8105123254
3.	Ridho Setia Putra	8105123246

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Pendidikan Sistem Ganda / Magang selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 s.d 23 Juli 2014 di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan untuk menerima dan memberikan bimbingan kepada siswa/i dimaksud pada Unit Kerja Saudara.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, Saya ucapkan terima kasih.


Plh. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

  
 Drs. M. Taufik Hidayat, M.Si  
 NIP 19591028 198002 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Universitas Negeri Jakarta

## Lampiran 3 Daftar Hadir PKL



*Building  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

---


**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

..... SKS

Nama : RANEGA DIAN PRAMANA  
 No.Registrasi : 8109123240  
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI RBB 2012  
 Tempat Praktik : SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
 Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUHS NO.66 / 021 - 3865580

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 23 Juni 2014	1.	
2.	Selasa, 24 Juni 2014	2.	
3.	Rabu, 25 Juni 2014	3.	
4.	Kamis, 26 Juni 2014	4.	
5.	Jumat, 27 Juni 2014	5.	
6.	Senin, 30 Juni 2014	6.	
7.	Selasa, 1 Juli 2014	7.	
8.	Rabu, 2 Juli 2014	8.	
9.	Kamis, 3 Juli 2014	9.	
10.	Jumat, 4 Juli 2014	10.	
11.	Senin, 7 Juli 2014	11.	
12.	Selasa, 8 Juli 2014	12.	
13.	Kamis, 10 Juli 2014	13.	
14.	Jumat, 11 Juli 2014	14.	
15.	Senin, 14 Juli 2014	15.	

Jakarta 23 Juli 2014




*DAFTAR*

**Catatan:**  
 Format ini dapat digunakan sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan



## Lampiran 4    Daftar Hadir PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

*Building Future Leaders*

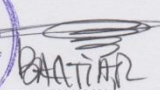
---

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**


Nama : RANEGA DIAN PRAMANA<sup>SKS</sup>  
 No.Registrasi : 0105123240  
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI '12  
 Tempat Praktik : SLUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
 Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUHS No.66 / 021.3865580

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Sabtu, 15 Juli 2014	1.	
2.	Rabu, 16 Juli 2014	2.	
3.	Kamis, 17 Juli 2014	3.	
4.	Jumat, 18 Juli 2014	4.	
5.	Senin, 21 Juli 2014	5.	
6.	Selasa, 22 Juli 2014	6.	
7.	Rabu, 23 Juli 2014	7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	


23 Juli 2014



**Catatan:**  
 Format ini dapat digunakan sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan



## Lampiran 5 Penilaian PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

*Building Future Leaders*

---

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**



**2 SKS**

Nama : RANGGA DIAN PRAMANA  
 No.Registrasi : 8105123240  
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI RE5 '12  
 Tempat Praktik : SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
 Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUIS NO.66 / 021. 3865580

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN																			
1	Kehadiran	<u>82</u>	1. Keterangan Penilaian:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Skor</td> <td style="width: 15%;">Nilai</td> <td style="width: 70%;">Predikat</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>55-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> </table> Nilai rata-rata: $\frac{798}{10} = 79,8$ Nilai Akhir: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;"><u>80</u></td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;"><u>A</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">Angka Bulat</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Predikat	80-100	A	Sangat Baik	70-79	B	Baik	60-69	C	Cukup	55-59	D	Kurang	<u>80</u>	<u>A</u>	Angka Bulat	Huruf
Skor	Nilai	Predikat																				
80-100	A	Sangat Baik																				
70-79	B	Baik																				
60-69	C	Cukup																				
55-59	D	Kurang																				
<u>80</u>	<u>A</u>																					
Angka Bulat	Huruf																					
2	Kedisiplinan	<u>79</u>																				
3	Sikap dan Kepribadian	<u>80</u>																				
4	Kemampuan Dasar	<u>80</u>																				
5	Keterampilan Menggunakan Fasilitas	<u>79</u>																				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	<u>80</u>																				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	<u>80</u>																				
8	Aktivitas dan Kreativitas	<u>79</u>																				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	<u>79</u>																				
10	Hasil Pekerjaan	<u>80</u>																				
<b>JUMLAH</b>		<u>798</u>																				

Jakarta 23 Mei 2014

Penilai

Catatan :  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan

# Lampiran 6 Jadwal PKL

JADWAL ORIENTASI PRAKTEK KERJA LAPANG  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Tanggal 23 Juni s.d 23 Juli 2014

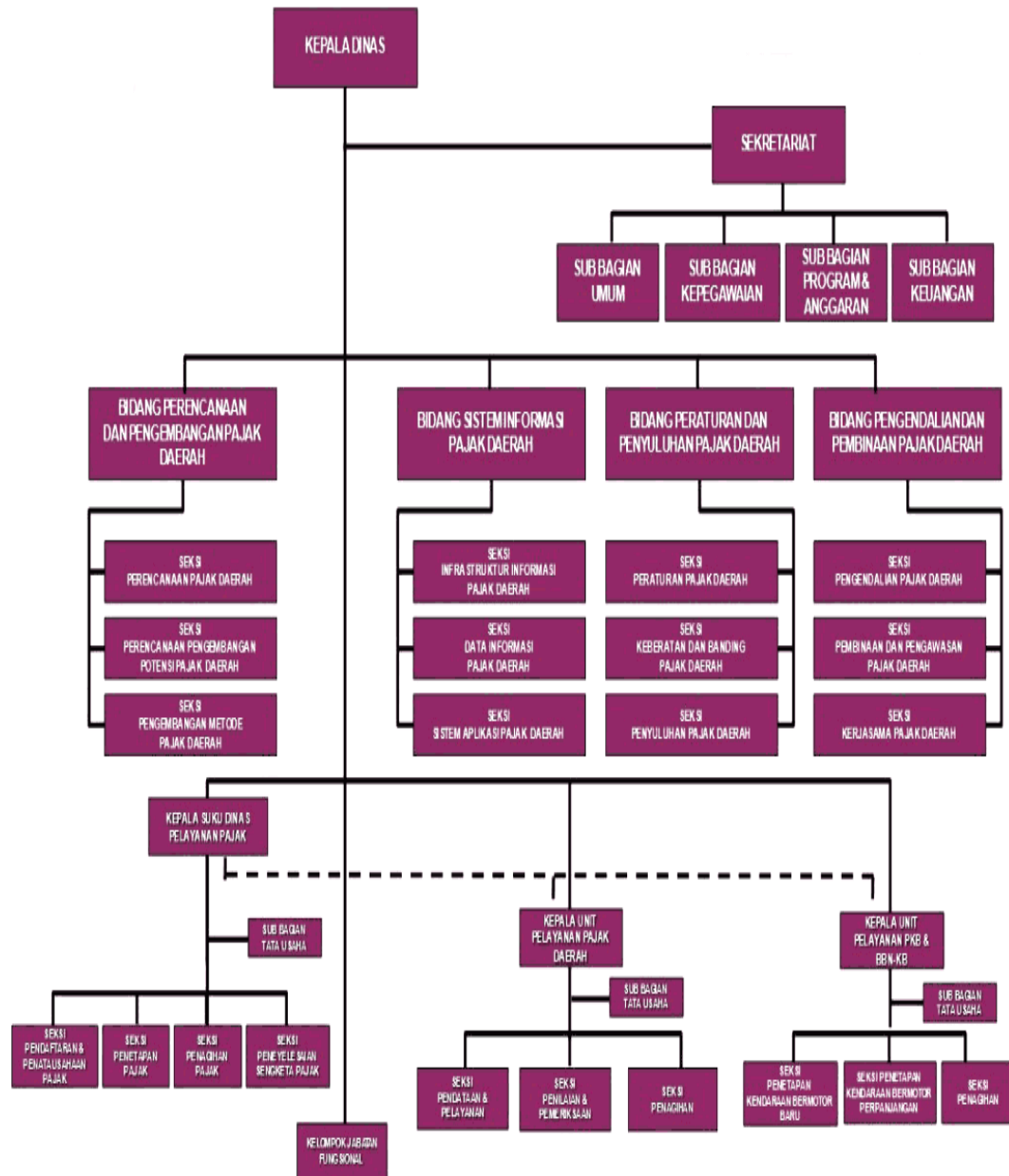
NO	NAMA	NIM	TEMPAT DAN TANGGAL ORIENTASI PKL				KETERANGAN
			SUBBAG TU	PENAGIHAN PAJAK	P 3 D	PENETAPAN	
1	Ridho Setia Putra	8105123246	23 s.d 27 Juni 2014	30 Juni s.d. 4 Juli 2014	7 s.d. 11 Juli 2014	14 s.d. 18 Juli 2014	21 s.d. 23 Juli 2014
2	Ricky Dharmawan Samsu	8105123254					
3	Rangga Dian Pramana	8105123240					

Ka. Sub. Bag. Tata Usaha  
Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

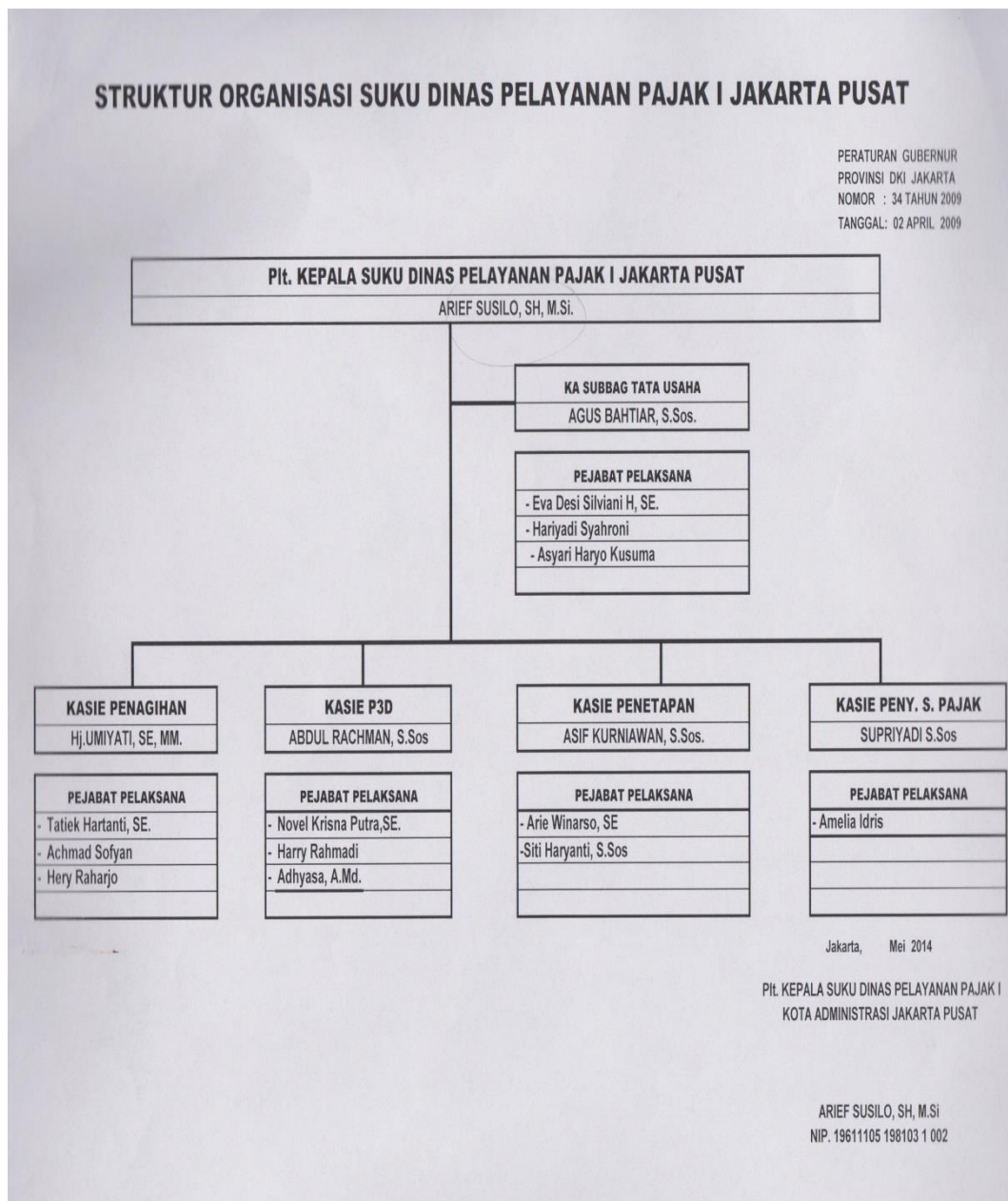
  
Agus Bahriar, S.Sos  
NIP. 19591125 198710 1 001



## Lampiran 7 Struktur Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta



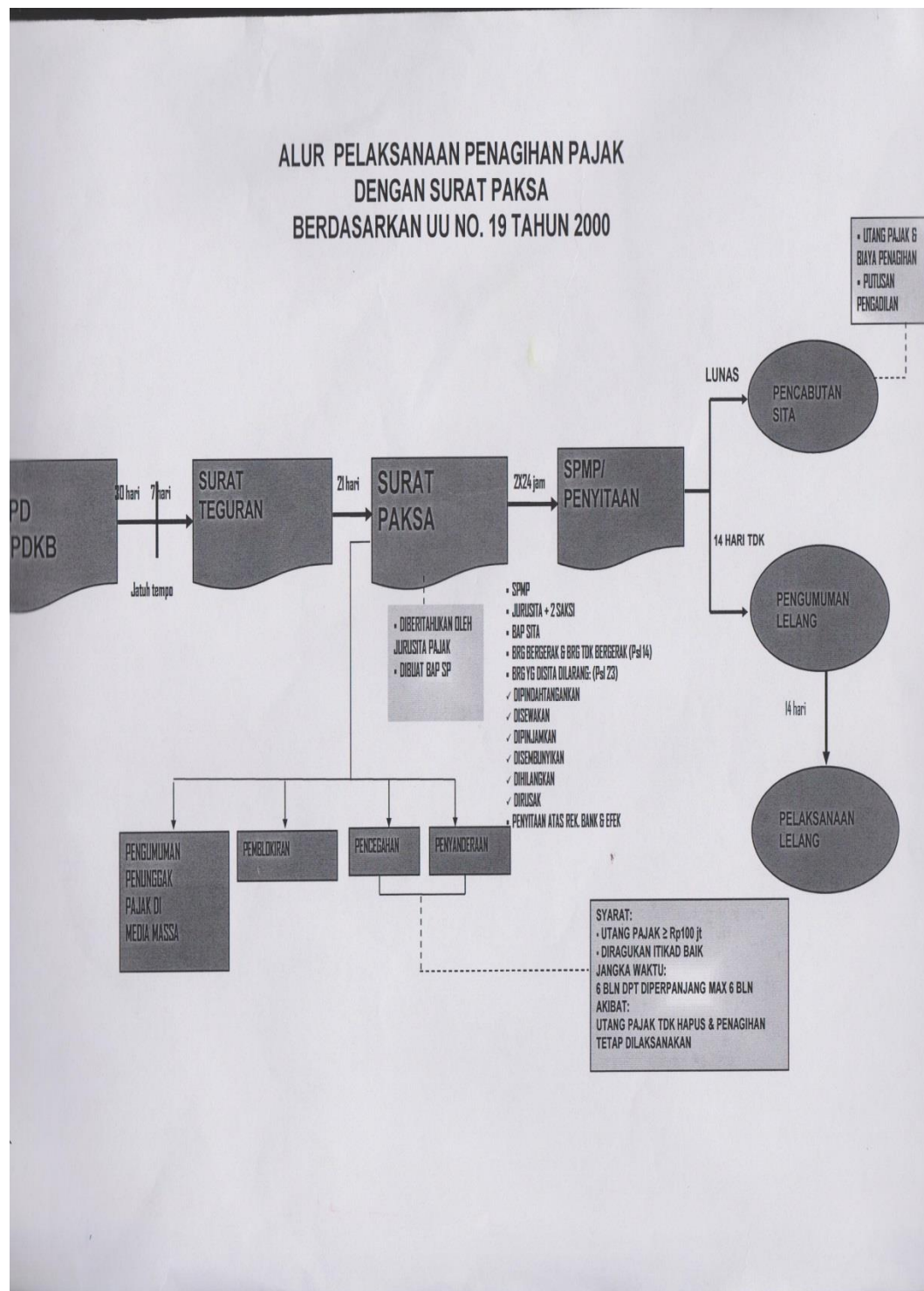
Lampiran 8 Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat



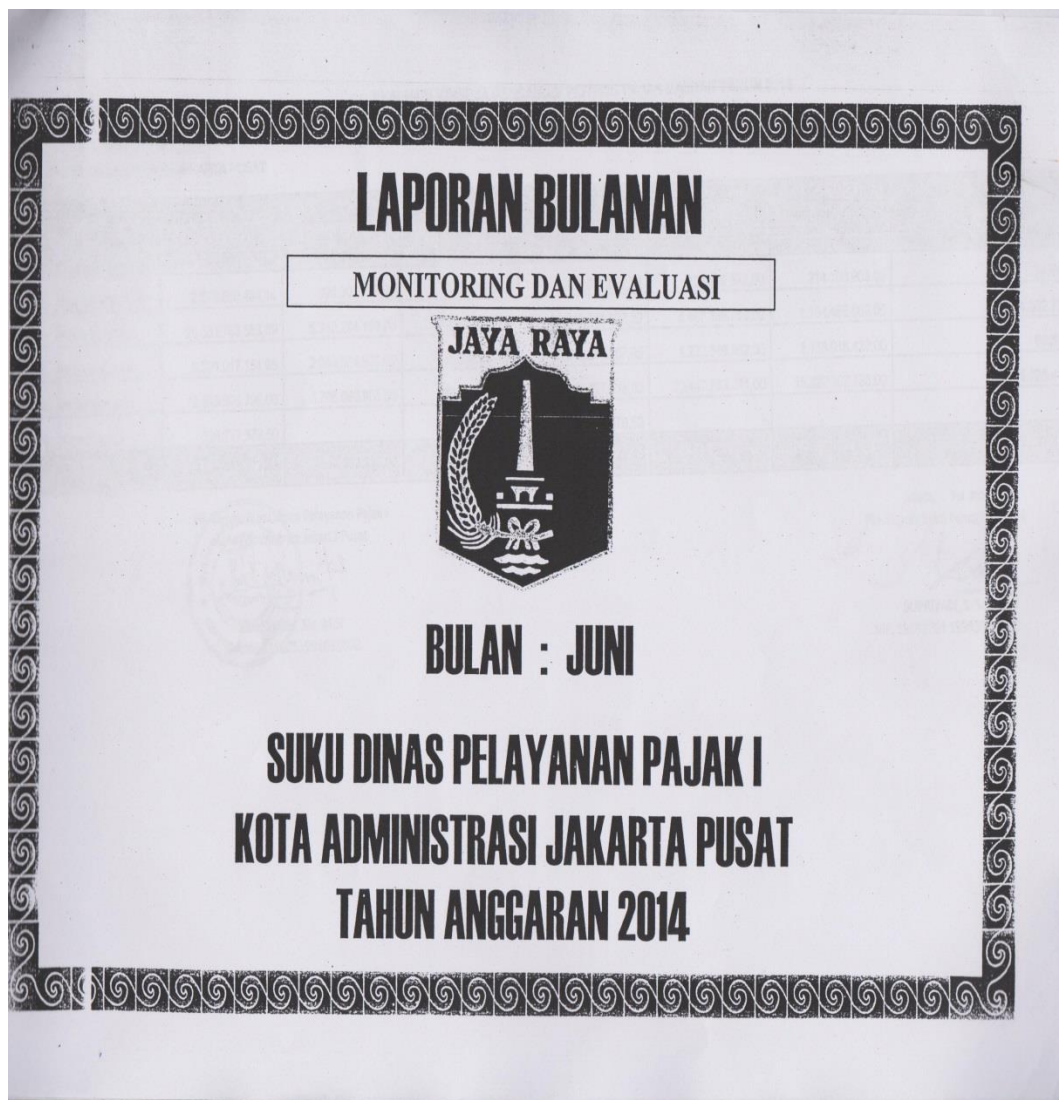
Lampiran 9    Logo



# Lampiran 10 Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak



Lampiran 11 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak





## Lampiran 12 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

IX

EVALUASI KINERJA PENCAIRAN PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2014  
S.D. BULAN JUNI 2014

SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG TAHUN LALU				PIUTANG TAHUN BERJALAN			
		SALDO PIUTANG	PEMBAYARAN	KEBERATAN	SISA	PIUTANG	PEMBAYARAN	KEBERATAN	SISA
1	PAJAK HOTEL	2.078.550.494,14	890.302.272,00	9.746.300,00	1.178.501.922,14	238.659.572,00	214.160.909,00	-	24.498
2	PAJAK RESTORAN	28.031.763.553,89	6.310.274.138,00	880.847.813,00	20.840.641.602,89	5.467.199.059,00	1.104.465.003,00	-	4.362.73
3	PAJAK HIBURAN	6.391.017.151,95	2.644.664.920,00	436.308.924,00	3.310.043.307,95	1.222.546.952,00	1.138.018.428,00	-	84.528
4	PAJAK REKLAME	12.923.996.798,00	3.705.060.908,00	62.508.075,00	9.156.427.815,00	20.447.783.071,00	15.222.368.138,00	-	5.225.41
5	PAJAK PARKIR	328.717.579,50	-	-	328.717.579,50	-	-	-	-
Jumlah		49.754.045.577,48	13.550.302.238,00	1.389.411.112,00	34.814.332.227,48	27.376.188.654,00	17.679.012.478,00	-	9.697.17

Plh. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kantor Administrasi Jakarta Pusat  
Arief Syarif, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak  
SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 19691201 1999303 1 003


## Lampiran 13 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH S.D BULAN JUNI 2014													
SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT													
JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN			REALISASI PENERIMAAN								PENCAPAIAN	
	SETAHUN	S.D BULAN INI		SETORAN MASA MUNDUR	PERBAIKAN SETORAN	PENCARAAN TUNGGAKAN	JUMLAH	% SETAHUN	SANKSI ADMINISTRASI	JAMBONG	JUMLAH POKOK PAJAK & DENDA	S.D BULAN INI	SETAHUN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PAJAK HOTEL	534.300.000.000	267.150.000.000		254.675.843.100	23.993.464	869.395.010	255.569.231.574	47,83	153.246.364	-	255.722.477.938	5,67	47,83
PAJAK RESTORAN	427.000.000.000	213.500.000.000		158.685.802.084	642.651.155	6.848.578.973	166.177.032.212	38,92	1.609.823.826	-	167.786.856.038	7,83	38,92
PAJAK Hiburan	139.889.000.000	69.945.000.000		51.397.127.747	-	3.249.095.960	54.646.223.707	39,06	458.282.411	-	55.104.506.118	8,13	39,06
PAJAK REKLAME	147.604.000.000	73.802.000.000		15.755.618.749	-	-	15.755.618.749	10,67	1.353.640.455	12.970.000	17.122.229.204	1,35	10,67
PAJAK PARKIR	44.800.000.000	22.400.000.000		15.812.183.096	-	-	15.812.183.096	35,30	6.668.526	-	15.818.851.622	0,59	35,30
JUMLAH	1.293.593.000.000	646.797.000.000		496.326.574.776	666.644.619	10.967.069.943	507.960.289.338	39,27	3.581.661.582		511.554.920.920	7,53	39,27

er Data :  
 Target dan Bidang Renbang  
 Realisasi dan Laporan Bulanan

INDIKATOR PENERIMAAN PERIODIK  
 SURPLUS/DEFISIT Rp. 785.632.710.662

Jakarta, Juli 2014  
 P. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 M. Supriyanto, SH, M.Si  
 151981031002



## Lampiran 14 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

Vl.a.

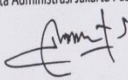
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK DAERAH**  
**S.D. S.D. BULAN JUNI 2014**

**SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT**

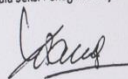
NO	HOTEL			RESTORAN			HIBURAN			PARKIR			REKLAME				
	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	BERMASALAH	TERTIBKAN	BAYAR		
	1	2	3 = 2-1	4	5	6 = 5-4	7	8	9 = 8-7	10	11	12 = 11-10	13	14 = 13-12	15	16	17
	202	170	32	1.060	796	264	148	128	20	44	43	1					31
JULI 2014	202	170	32	1.060	796	264	148	128	20	44	43	1					
PROSENTASE	84,16	18,82		9,64	3,20		86,49	13,51		97,73	2,27						

Sumber Data : Laporan Bulanan Sudin

Pt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak

  
SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003



# Lampiran 15 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

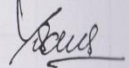
RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014														
LAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT														
JENIS PAJAK	BULAN (Rp)												JUMLAH	PENCANAAN
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES		
HOTEL	45.787.849.582	38.659.440.825	43.354.390.962	45.232.498.047	38.380.035.301	44.155.216.857							255.589.231.574	47,8
RESTORAN	31.951.834.302	23.641.774.254	26.700.873.114	26.082.466.502	28.002.471.411	30.073.455.240							166.452.874.823	38,9
HIBURAN	10.200.638.440	7.182.256.667	7.829.224.548	9.272.189.201	9.130.312.840	11.031.602.011							54.646.223.707	39,0
REKLAME	2.001.398.545	1.048.162.050	3.076.150.025	3.991.245.713	3.237.941.816	2.442.638.100							15.797.536.249	10,7
PARKIR	2.511.967.407	2.731.135.157	2.634.470.058	2.640.300.792	3.028.021.204	2.268.288.478							15.812.183.096	35,3
JUMLAH	92.453.488.278	71.282.768.953	83.694.108.707	87.216.704.255	81.778.782.572	89.968.200.686							508.278.048.448	39,2

Pt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014

Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak



SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003

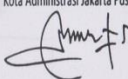
# Lampiran 16 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

**UPAYA - UPAYA PENAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**S.D. BULAN JUNI 2014**

**PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT**

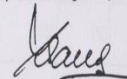
URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
Himbauan/Pemberitahuan	-	-	-	-								
Teguran Belum Melakukan Pemeriksaan Massa	57	2	56	11	109							
Teguran Terlambat melaporkan D	-	-	-	-		121						
Teguran SKP Jatuh Tempo	26	94	15		14							
Tagihan Pajak Daerah	291	-	362	331	249							
Pemanggilan Wajib Pajak	-	7	-	-	1							

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plt. Kepala Seksi Penagihan Pajak



SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003

## Lampiran 17 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak


# REKAP NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH S.D BULAN JUNI 2014

Sudin :

## PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

JENIS PAJAK	TARGET PENE MAAN	JML WP AKTIF	BULAN LALU			BULAN INI			S.D DENGAN BULAN INI			
			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			
			NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PAJAK HOTEL	534,3	1,000,000	202	4	3	199,903,594	1	1	(481,801)	5	4	199,421,79
PAJAK RESTORAN	427,0	1,000,000	1060	44	27	4,305,917,946	2	1	41,023,453	46	28	4,346,941,39
PAJAK HIBURAN	139,8	1,000,000	148	5	3	965,792,062	0	0		5	3	965,792,06
INSIDENTAL			0	53	50	2,971,660,302	16	16	598,838,150	69	66	3,570,498,45
PAJAK PARKIR	44,8	1,000,000	44	0	0		0	0		0	0	
PAJAK REKLAME	147,6	1,000,000	126	143	143	14,684,297,299	13	13	2,851,869,594	156	156	17,536,166,89
PAJAK PBB							0	0		0	0	
JUMLAH	1,293,5	1,000,000	1,580	249	226	23,127,571,203	32	31	3,491,249,396	281	257	26,618,820,599

KEPALA SEKSI PENETAPAN PAJAK  
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT



ASIF KURNIAWAN  
NIP. 19720314 199303 1 008

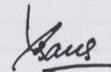
## Lampiran 18 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

**EVALUASI KEBERATAN/PENGURANGAN/KERINGANAN PAJAK DAERAH**  
**S.D. BULAN JUNI 2014**

Sudin : Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat

No	JENIS PAJAK	JUMLAH			% PENCAPAIAN	NILAI ( Rp )
		PERMOHONAN WP	DIPROSES	SELESAI		
1	2	3	4	5	6=5:3	7
1	HOTEL	2	1	1	50	Rp. 9,746,300.00
2	RESTORAN	10	2	8	80	Rp. 420,300,001.00
3	HIBURAN	5	-	5	100	Rp. 203,275,719.00
4	REKLAME	10	-	10	100	Rp. 529,219,585.00
5	PARKIR	-	-	-	-	Rp. -
6	PBE	4	-	4	100	Rp. 4,199,047,918.00
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>90</b>	<b>Rp. 5,361,589,523.00</b>

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK  
 SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT



SUPRIYADI, S. Sos  
 NIP. 19691201 199303 1 003



## Lampiran 19 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

REALISASI PENYERAPAN KEGIATAN SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT S/D JUNI 2014								
NO.	URAIAN KEGIATAN	REALISASI S/D BULAN INI						
		Jumlah Anggaran	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Anggaran (SP2D)		Realisasi Administrasi (SPJ)		% Realisasi Fisik (Kegiatan Terlaksana)
				Nilai Penyerapan	%	Nilai Administrasi	%	
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8 = 7/3	9
	<b>1.20.40. Program Pelayanan Pajak Daerah.</b>	<b>2.035.000.000</b>		<b>974.587.015</b>	<b>48</b>	<b>247.247.490</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
001	Rakor Pemungutan PBB di Tingkat Kota Administrasi	100.000.000	Pebruari-Desember	50.098.990	50	-	-	-
002	Pekan Panutan PBB di Wilayah Kota Administrasi	125.000.000	September	124.998.940	100	-	-	-
003	Partisipasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I dalam rangka Macan Kemayoran Expo	100.000.000	September	99.993.465	100	-	-	-
004	Partisipasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I dalam rangka Jakarta Pusat Fair	50.000.000	Juni	-	-	-	-	-
005	Koordinasi Pendataan dan Penerbitan Reklame di Wilayah Sudin PP I Jakarta Pusat	200.000.000	Pebruari-Desember	69.651.260	35	-	-	-
006	Koordinasi Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah	150.000.000	Mei-September	74.944.980	50	-	-	-
007	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah	200.000.000	Juni	199.900.420	100	156.696.790	78	-
008	Rekonsiliasi dan Konfirmasi Pembayaran di Wilayah Sudin Pelayanan Pajak I Kota Adm. Jak Pus	120.000.000	Januari - Desember	59.999.530	50	29.478.300	25	-
009	Koordinasi Pencairan Tunggal Pajak Daerah Lainnya di Wil. Sudin Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	75.000.000	50	36.654.100	24	-
010	Supervisi dan Pemeriksaan Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas PP I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	74.999.970	50	-	-	-
011	Pengawasan dan Pemeriksaan Hiburan Insidental di Wilayah Sudin PP I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	74.999.700	50	-	-	-
012	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Online System	100.000.000	Januari - Desember	49.999.960	50	24.418.300	24	-
013	Pelaksanaan Silent Operation Pajak Daerah setelah Online System	400.000.000	Januari - Desember	-	-	-	-	-
014	Pelatihan CMS kepada Wajib Pajak Daerah	40.000.000	Januari - Desember	19.999.800	50	-	-	-
	<b>Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor</b>	<b>165.000.000</b>		<b>77.011.985</b>	<b>47</b>	<b>2.047.635</b>	<b>1</b>	
001	Penyediaan Kerumahaan Sudin Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat	100.000.000	Januari - Desember	49.994.350	50	-	-	-
002	Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja	50.000.000	Januari - Desember	24.970.000	50	-	-	-
003	Penyediaan Jasa Internet	15.000.000	Januari - Desember	2.047.635	14	2.047.635	14	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.200.000.000</b>		<b>1.051.599.000</b>	<b>48</b>	<b>249.295.125</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Jakarta, 30 Juni 2014  
KASUBAG TATA USAHA SUDIN PELAYANAN PAJAK I  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

AGUS BACHTIAR, S.Sos  
NIP. 19591125 198710 1 001

## Lampiran 20 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

XI.

**EVALUASI PROGRAM KERJA  
S.D. BULAN MEI**

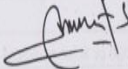
SUDIN : PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT

NO	URAIAN KERJA	TARGET WAKTU	VOLUME	TAHAPAN PELAKSANAAN YANG DILAKUKAN	OUTPUT (HASIL)
I.	18 Strategi				
1	Pemeriksaan Lengkap Objek Pajak Daerah	Jan-Des		1. Menyusun prognosa penerimaan per wajib pajak	Rencana potensi penerimaan
a.	Pajak Hotel			2. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan	rencana ketetapan
b.	Pajak Restoran			3. Menyusun daftar wajib pajak yang akan diperiksa	Daftar WP yang akan diperiksa
c.	Pajak Hiburan			4. Menerbitkan surat tugas pemeriksaan	Surat Tugas
d.	Pajak Parkir			5. Melakukan pemeriksaan	KKP
e.	Pajak Reklame			6. Membuat laporan hasil pemeriksaan	LHP
				7. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak	SKPD
2	Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jan-Des			
3	Penagihan Piutang Pajak dengan Surat Paksa	Jan-Des		1. Menyusun dan meneliti daftar tunggakan wajib pajak	Daftar Tunggakan/Piutang
				2. Melakukan konfirmasi tunggakan dengan wajib pajak	Surat Pemberitahuan Konfirmasi
				3. Mengirimkan surat-surat penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan	Surat Teguran, STPD
				4. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penagihan dengan surat paksa	Surat Paksa
4	Menguatkan Komitmen Aparat	Jan-Des		1. Membuat laporan kehadiran pegawai	BA Daftar Hadir Pegawai
				2. Melakukan Pertemuan Rutin setiap hari senin	Meningkatkan komitmen/kinerja
5	Pelayanan Prima	Jan-Des		1. Menerbitkan surat tugas dan jadwal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Walikota Jakarta Pusat dan gerai pajak senayan city	Surat Tugas
				2. Melakukan pelayanan sesuai jadwal	Menerima SSPD dan SPTPD
				3. Lain-lain pelayanan kepada wajib pajak	yang telah divalidasi dan di ttd
II	Rencana Program Renstra DPP				
1	Rakor Pemungutan PBB	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
2	Pekan Panutan PBB	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
3	Partisipasi Sudin PP I JP dlm rangka Macan	Sept		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan

# Lampiran 21 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

NO	URAIAN KERJA	TARGET WAKTU	VOLUME	TAHAPAN PELAKSANAAN YANG DILAKUKAN	OUTPUT (HASIL)
	Kemayoran Expo				
4	Partisipasi Sudin dlm rangka Jakarta Pusat Fair	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
5	Koordinasi Pendataan dan Penertiban Reklame	Feb-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
6	Koordinasi Pemutakhiran data Objek dan Subjek	Mei-Sept		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
7	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
8	Rekonsiliasi dan Konfirmasi Pembayaran	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
9	Koordinasi Pencairan Tunggakan Pajak	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
10	Supervisi dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
11	Pengawasan dan Pemeriksaan Hiburan Isidental	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
12	Monitoring Pembayaran dan Evaluasi Online System	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
13	Pelaksanaan Silent Operation	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
14	Pelatihan CMS kepada Wajib Pajak	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002



## Lampiran 22 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

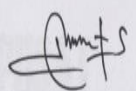
XII.

**PERMASALAHAN DAN UPAYA**

**SUDIN PELAYANAN PAJAK I**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO	PERMASALAHAN	UPAYA	KET
I.	Kegiatan Pemungutan		
1	Kondisi SDM untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan di lapangan masih kurang (Struktur organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak tidak ada seksi pemeriksaan)	1. Melibatkan SDM dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) 2. Perlu penyempurnaan Perda Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan mengakomodir seksi pemeriksaan	
2	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih kurang	1. Melakukan konfirmasi Pembayaran/ Setoran Masa 2. Menerbitkan Surat Teguran	
3	Kurangnya Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan	1. Memberikan penjelasan mengenai ketentuan pajak yg berlaku	
II.	Program Kerja		
1	Pengesahan APBD terlambat, sehingga jadwal kegiatan mundur	1. Melakukan Penyesuaian jadwal kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dan anggaran dapat diserap	

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
 Arief Susilo, SH, M.Si  
 NIP. 196111051981031002



## Lampiran 23 Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3663360 - 65 FAKS 3663360  
JAKARTA 10160

---

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )  
PAJAK HIBURAN**

Nomor : .....

Unit Pengelola : ..... Suku Dinas Pelayanan Pajak .....

(Diisi oleh petugas)

---

**I. Data Objek Pajak :**

1. Nama Objek Pajak : .....
2. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Kelurahan : .....
4. Kecamatan : .....
5. Kota/Kab. Adm : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. TMT Operasi : .....

**II. Data Wajib Pajak :**

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Badan Hukum : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Nama Pemilik/  
Penanggung Pajak : .....
4. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
5. Kelurahan : .....
6. Kecamatan : .....
7. Kota/Kab. Adm : .....
8. Nomor Telepon : .....
9. NIK/NPWP : .....
10. NPWPD : .....

**III. Data Usaha :**

1. Status Usaha : ☐ 1. Induk ☐ 2. Cabang
2. Jenis Hiburan :
  - a. Pertunjukan Film, golongan bioskop .....
  - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya .....
  - c. Pagelaran Musik dan Tari .....
  - d. Diskotik .....
  - e. Karaoke .....
  - f. Klub Malam/Bar .....
  - g. Permainan Biliard .....
  - h. Permainan Ketangkasan .....
  - i. Permainan Mesin Keping .....
  - j. Panti Pijat/Refleksi .....
  - k. Spa/Sauna/Mandi Uap .....
  - l. Pertandingan Olah Raga .....
  - m. Selancar Es/Ice Skate .....
  - n. Taman Hiburan/Rekreasi .....
  - o. Hiburan Insidental .....
  - p. Hiburan Lainnya : .....
3. Sifat Pertunjukan : Rutin/Insidental
4. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : ..... m<sup>2</sup> Bangunan : ..... m<sup>2</sup>
5. Luas Tempat Usaha : ..... m<sup>2</sup>
6. Status Kepemilikan Tempat Usaha :
  - a. Milik Sendiri
  - b. Sewa / Kontrak
  - c. Bagi Hasil

## Lampiran 24 Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan

2

7. Jam Pertunjukan/Operasi: a. Jam ..... s.d. jam .....  
 b. Jam ..... s.d. jam .....  
 c. Jam ..... s.d. jam .....  
 d. Jam ..... s.d. jam .....
8. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp. ....  
 b. Menggunakan Cover Charges Rp .....  
 c. Kartu Anggota/Members Card Rp ...../.....  
 d. Coin Rp. ....  
 e. Ruangan/Kamar  
     1) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
     2) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
     3) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
     4) ..... Kamar / Rp. .... / .....
9. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk .....  
 b. Jumlah Mesin .....  
 c. Jumlah Meja .....  
 d. Jumlah Jalur .....  
 e. ....
10. Fasilitas Penunjang : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak ada  
 b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil ..... unit  
                                   2). Motor ..... unit  
 c. Pengelola Parkir : .....  
 d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. Izin Pariwisata Nomor ..... masa berlaku .....  
 b. Izin Undang-Undang Gangguan ..... masa berlaku .....  
 c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor ..... masa berlaku .....  
 d. Izin Mengelola Parkir Nomor ..... masa berlaku .....  
 e. Izin Reklame ..... masa berlaku .....  
 f. ....

### IV. Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.


Petugas Penerima, Jakarta, .....  
 Wajib Pajak/Penangguang Pajak,

NIP .....

Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

## Lampiran 25 Font SSPD



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788  
 JAKARTA 10160

---

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
( SSPD )**

---

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....

3. NPWPD : .....

4. NOPD : .....

5. Jenis Pajak : .....

6. Nama Objek Pajak : .....

7. Alamat Objek Pajak : .....

8. Masa Pajak : .....

9. Tahun Pajak : .....

10. Setoran ( beri tanda pada salah satu kotak dibawah ini )

☐ Masa : Bulan : ..... Tahun : .....

☐ SKPD : No. ....

☐ SKPDKB : No. ....

☐ SKPDKBT : No. ....

☐ STPD : No. ....

11. Besar Setoran :

No.	AYAT /KODE REKENING	URAIAN	BESAR SETORAN
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
Jumlah Setoran			Rp.

Terbilang : .....

Ruang untuk teraan mesin  
Kas Register

Cap

Diterima oleh :  
 Petugas :  
 Tanggal :  
  
 Tanda tangan :  
 Nama Jelas :

Jakarta,

Penyetor,

(.....)  
 Nama/Cap/Stempel

PEMBAYARAN SAH, BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER

Lembar 1. Warna Putih untuk Wajib Pajak  
 2. Warna Merah untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPD  
 3. Warna Kuning untuk BPKD / BANK  
 4. Untuk Laporan WP ke Dipenda  
 5. Untuk Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788  
JAKARTA 10160

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPPTPD ) PAJAK HIBURAN</b> Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....		Kepada Yth ..... ..... di Jakarta
Perhatian :		
1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 4. Keterlambatan Penyerahan SPPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
<b>I. Identitas Wajib Pajak :</b>		
a. Nama Objek Pajak	:	.....
b. Alamat	:	.....
	RT .....	RW ..... Kode Pos .....
c. Nama Objek/Usaha	:	.....
d. Alamat	:	.....
e. NPWPD	:	.....
<b>II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan :</b>		
Klasifikasi Hotel	:	<input type="checkbox"/> 1. Pertunjukan Film. 2. Pertunjukkan Film dan Tari Nasional. 3. Pagelaran Musik. 4. Diskotik. 5. Karaoke. 6. Klub Malam/Bar 7. Permainan Biliard 8. Permainan Ketangkasan 9. Permainan Mesin Keping 10. Panti Pijat/Refleksi 11. Spa/Sauna/Mandi Uap 12. Pertandingan Olah Raga 13. Selancar Es/Ice Skate 14. Taman Hiburan/Rekreasi 15. Hiburan Insidentil 16. Hiburan Lainnya : .....
b). Data Pembayaran	:	
1). Pembayaran Dari	:	Dalam Rupiah
a). Persewaan Ruangan/Kamar		Rp.
b). Penjualan Makanan dan Minuman		Rp.
c). Cover Charge/Minumum Charge		Rp.
d). Penjualan Karcis		Rp.
e). Penjualan Fasilitas Lainnya ( dalam satu Bill/Bon )		Rp.
f). Penjualan Score/Coin.		Rp.
g). .....		Rp.
2). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) ( jumlah 1.a s.d 1.g )		Rp.
a). Tarif Pajak ..... %		Rp.
b). Pajak Terutang ( Tarif x DPP )		Rp.
c). Sanksi Administrasi		Rp.
d). Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar		Rp.
e). Pajak Yang Kurang/Lebih Bayar		Rp.
f). Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar		Rp.

## Lampiran 26 Excel Tunggalan

TUNGGAKAN RESTORAN 2014.xlsx - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

Security Warning Automatic update of links has been disabled Enable Content

BA352

DAFTAR TUNGGAKAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN  
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
S.D JUNI 2014

No	NAMA OBIEK PAJAK	ALAMAT OBIEK PAJAK	NOPO	THN PAJAK	NOMOR KETetapan	MASA PAJAK	TANGGAL SKP TERBIT	TUNGGAKAN AKHIR	KET
								JUMLAH	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	21
DAFTAR PUTANG PAJAK RESTORAN YANG DITERIMA TAHUN 2003 DAN TAHUN 2004 YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS									
1	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1995	43.31			41.877.273.00	Kedaluarsa
2	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1994	43.31			23.113.398.00	Kedaluarsa
3	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1993	43.31			8.079.679.00	Kedaluarsa
4	RM TAICHAN	Jl. Iskandarsyah II/2		2002				8.427.260.00	SUDIN SELATAN 1
5	RM RADEN KURNI	Jl. Raden Saleh No. 62		1994	43.31			972.867.37	UPPD SENEN
6	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		1999	43.3.01.08.10.00009			104.631.164.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
7	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		1998				62.268.798.00	UPPD MENTENG
8	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		2000				35.539.042.00	UPPD MENTENG
9	CAFE JAWA PUB	Jl. MH. Thamrin		1993	43.3.02.01.15.0002			9.850.597.00	UPPD MENTENG
10	CAFE JAWA PUB	Jl. MH. Thamrin		1994				5.074.150.00	UPPD MENTENG
11	RM PETES TAVEI	Jl. MH. Thamrin Kav.3		1995	43.31			120.088.010.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36271-1.723
12	RM PETES TAVEI	Jl. MH. Thamrin Kav.3		1994				46.613.456.00	UPPD MENTENG
13	CAFE GREEN PUE	Jl. Moh. Thamrin No.9		1994	43.31			4.682.755.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
14	CAFE GREEN PUE	Jl. Moh. Thamrin No.9		1995				3.622.034.00	UPPD MENTENG
15	RM IKAN BAKARI	Jl. Cikini Raya No. 73		1995	43.31			17.598.135.00	UPPD MENTENG Turup OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36254-
16	RM IKAN BAKARI	Jl. Cikini Raya No. 73		1993				6.552.000.00	UPPD MENTENG Turup
17	RM FUNAWAN	Jl. MH. Thamrin No.59		1994	43.31			3.141.290.50	UPPD MENTENG
18	RM FUNAWAN	Jl. MH. Thamrin No.59		1995				1.724.526.50	UPPD MENTENG
19	RM PHO PHO	Jl. H. Agus Salm		1997	43.31			3.083.787.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
20	RM MALLUEES	Plaza Indonesia		1995	43.31			4.746.204.44	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36221-1.723
21	RM TORIGIN	Jl. Hos. Cokroaminoto No. 81		1994	43.31			676.998.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36211-1.723
22	RM SARINAH FDI	Jl. MH. Thamrin No. 11		1995	43.31			7.628.408.00	UPPD MENTENG
23	KUK BUNG RESTORAN	Jl. Sudirman No. 44.45.46		1999	15.09.08.12.0004.2002.0	13.01.2002	25.01.04	24.272.710.00	UPPD MENTENG

REKAP APR MEI 2014 McDonald REKAP MEI JUN 2014 REKAP JUN 2014 Sheet1

Ready

## Lampiran 27 Excel Monitoring

TUNGGAKAN JUNI 2014-HTL-HIB-REK-PKR.xlsx - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewView

Paste

Clipboard

Font

Calibri11

Font icons

Alignment

Wrap Text

Align icons

Number

General

Number icons

Styles

Conditional Formatting

Format as Table

Cell Styles

Insert

Delete

Format

Cells

AutoSum

Fill

Clear

Sort & Filter

Find & Select

A44

DAFTAR TUNGGAKAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL															
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT															
PERIODE : JUNI 2014															
No.	AMA WAJIB PAJAL	AMAT WAJIB PAJAL	Pemis Paja	Nama Usaha	Alamat Usaha	NOPDINPWP	Nomor Ketetapan	Masa Pajak		Tanggal SKPD		SISA TUNGGAKAN			
								Bulan	Tahun	Terbit	J. Tempo	POKOK	KENAIKAN	BUNGA	SAKSI / PERBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1				2	3	4	5	6	7	8	9				
1				HOTEL NUSANTARA HOTEL	Jl. KH. Mas Mansur No. 36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2003.5.H	Jan - Des	2003	26-Jul-06	25-Aug-06	43,125,538.30	-	-	18,312,661.79
2				HOTEL NUSANTARA HOTEL	Jl. KH. Mas Mansur No. 36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2004.5.H	Jan - Des	2004	26-Jul-06	25-Aug-06	50,184,782.80	-	-	21,430,434.30
3				HOTEL NUSANTARA HOTEL	Jl. KH. Mas Mansur No. 36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2005.5.H	Jan - Des	2005	26-Jul-06	25-Aug-06	66,520,507.75	-	-	25,881,882.33
4				HOTEL NUSANTARA HOTEL	Jl. KH. Mas Mansur No. 36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2006.5.H	Jan - April	2006	26-Jul-06	25-Aug-06	4,822,050.30	-	-	3,797,630.09
Sub Total 2006												164,652,880.15	-	-	70,421,958.51
1				HOTEL KALISMA HOTEL	Jl. KS. Tubun No. 15-17	43.3.01.04.01.00001	3.015.12/004.2005.5.H	2005	2005	20/7/2007	19/8/2007	-	-	-	5,990,006.24
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2006.5.H	2006	2006	23/7/2007	22/8/2007	31,602,981.00	7,900,745.00	9,006,635.00	10,707,072.56
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2005.5.H	2005	2005	23/7/2007	22/8/2007	56,173,246.00	14,044,812.00	25,542,759.00	19,796,062.04
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2004.5.H	2004	2004	23/7/2007	22/8/2007	43,867,761.00	10,965,940.00	21,056,525.00	15,545,734.24
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2004.5.H	2003	2003	23/7/2007	22/8/2007	15,638,241.00	3,809,560.00	7,506,356.00	5,542,182.40
Sub Total 2007												147,280,229.00	36,822,057.00	63,112,272.00	57,582,067.48
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26		43.3.02.01.01.00002	3.006.12/006.2007.5.	Jan - Des	2007	13-Feb-09	14-Mar-09	36,363,216.00	9,233,054.00	13,267,931.00	7,386,443.00
1	PT. ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26			HOTEL ATLANTIC PERM. Jl. Salemba Raya No. 26		43.3.02.01.01.00002	3.006.12/006.2008.5.	Jan - Juni	2008	13-Feb-09	14-Mar-09	24,020,791.00	6,005,199.00	4,379,795.00	4,904,590.00
Sub Total 2009												60,383,006.00	15,238,252.00	17,787,636.00	12,190,603.00
1	YAYASAN PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19			HOTEL WISMA PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19		NOPD.01.03.04.07.01.01	01.03.04.015.11.2.2006	Jan - Des	2006	18-Nov-10	18-Dec-10	1,193,146.00	287,287.00	589,489	
2	YAYASAN PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19			HOTEL WISMA PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19		NOPD.01.03.04.07.01.01	01.03.04.015.11.2.2007	Jan - Des	2007	18-Nov-10	18-Dec-10	3,359,568.00	839,642.00	2,016,141.00	
3	YAYASAN PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19			HOTEL WISMA PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19		NOPD.01.03.04.07.01.01	01.03.04.015.11.2.2008	Jan - Des	2008	18-Nov-10	18-Dec-10	4,521,185.00	1,130,296.00	2,712,711.00	
4	YAYASAN PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19			HOTEL WISMA PHIKVITANG Jl. Kiliwang Raya No. 19		NOPD.01.03.04.07.01.01	01.03.04.015.11.2.2009	Jan - Des	2009	18-Nov-10	18-Dec-10	1,085,570.00	271,493.00	624,433.00	
Sub Total 2010												10,114,821.00	2,528,718.00	6,041,774.00	-
1	CY. BINTANG JOHAN NARADA NO. 29			HOTEL HOTEL BINTANG JOHAN NARADA NO. 29		101.05.04.09.0078	03.10.04.09.012.2001	JAN-DES	2012	28-Mar-13	25-Apr-13	1,585,120.00	-	322,794.00	
2	CY. BINTANG JOHAN NARADA NO. 29			HOTEL HOTEL BINTANG JOHAN NARADA NO. 29		101.05.04.09.0078	04.10.04.09.011.2001	SEP-DES	2011	26-Mar-13	25-Apr-13	3,083,464.00	-	982,912.00	
3	BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19			HOTEL HOTEL BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19		101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2003	JAN-DES	2013	23-Dec-13	22-Jan-14	131,631,671.00	-	63,831,204.00	
4	BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19			HOTEL HOTEL BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19		101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2005	JAN-DES	2008	23-Dec-13	22-Jan-14	132,806,835.00	-	63,747,281.00	
5	BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19			HOTEL HOTEL BUMI JOHAR JL. JOHAR NO. 17-19		101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2004	JAN-FEB	2009	23-Dec-13	22-Jan-14	22,008,607.00	-	10,562,692.00	
6				HOTEL TATOR HOTEL	JAWA NO. 37	101.83.04.07.0015	10.10.04.07.012.2.005	JAN-FEB	2011	13-Feb-13	14-Mar-13	8,794,000.00	2,188,500.00	2,517,241.00	
HOTEL PARKIR HIBURAN JUNI 2014															

Ready

50%

## Lampiran 28 Reklame



Teks Reklame : PRODUK BENTOEL / DUNHILL  
Alamat Pemasangan : Jl. Inspeksi Karet Pasar Baru Timur



## Lampiran 29 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us x Forum Komunikasi DPP x REKLAME DPP DKI JAKARTA x SIM REKLAME DPP DKI JAK...

10.15.90.9/reklame/index.php/daftar/index

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Pendaftaran Reklame

PENDAFTARAN BARU PENDAFTARAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BDU

Nomor Pendaftaran :

Nama Pemohon :

Tanggal Daftar :  sd.

Cari

1 2 3 > AKHIR >

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA PEMOHON	TEKS REKLAME	JENIS	ALAMAT REKLAME	TANGGAL DAFTAR		
1	201410100192	PT. MEDIA INDRA BUANA	PRODUK HM SAMPOERNA	LED (LIGHT EMITTING DIODE)	JLN. ASIA AFRIKA/PINTU IX	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
2	201410100191	PT. AVABANINDO PERKASA	PRODUK BANK MANDIRI	LED (LIGHT EMITTING DIODE)	JLN. M.H. THAMRIN	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
3	201410100188	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	LOGO MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
4	201410100187	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	LOGO MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
5	201410100189	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	HURUF TIMBUL MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
6	201410100190	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	HURUF TIMBUL MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
7	201410100186	PT. PLAZA INDONESIA REALTY	THE BLESSINGS OF RAMADHAN - CITI BANK	KAIN	JLN. M.H. THAMRIN	30-June-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
8	201410100185	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PRODUK BANK BNI	PAPAN	JLN. INSPEKSI/KARET PS BARU TIMUR	30-June-2014	VIEW	UPDATE DATA WP

Waiting for asrv-a.akamaihd.net... BNIISA PRODUK SUPER JLN. KH. MAS

2:15 PM 7/2/2014



## Lampiran 30 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us Forum Komunikasi DPP REKLAME DPP DKI JAKARTA REKLAME DPP DKI JAKARTA

10.15.90.9/reklame/index.php/izin/index Google

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Surat Izin Reklame

PROSES PERIZINAN

No Izin :

NOPD :

Nama Pemohon :

Cari

1 2 3 > AKHIR >

NO	NO IZIN	TGL IZIN	NAMA PEMILIK	TEKS REKLAME	LOKASI REKLAME
----	---------	----------	--------------	--------------	----------------


2:55 PM 7/2/2014

## Lampiran 31 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us x Forum Komunikasi DPP x REKLAME DPP DKI JAKARTA x REKLAME DPP DKI JAKARTA x +

10.15.90.9/reklame/index.php/daftar/view/201410100192 Google

 **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Detail Pendaftaran

[KEMBALI KE PENDAFTARAN](#) [CETAK PENDAFTARAN](#)

No Pendaftaran	201410100192
No Izin Sebelumnya	
Nama Pemohon	PT. MEDIA INDRA BUANA
Alamat Pemohon	JL. BENDUNGAN HILIR RAYA G II 10 B
Nama yg Dikuasakan	IDEM
Alamat yg Dikuasakan	IDEM
No. Telp/HP	021 573 3566
Teks Reklame	PRODUK HM SAMPOERNA
Luas	72 m2
Muka	1 muka
Kode Jenis	0107
Status Pasang	BARU
Jenis	L E D (LIGHT EMITTING DIODE)
Lokasi	RUANG NON PEMDA
Alamat Reklame	POS1 JLN. ASIA AFRIKA/PINTU IX
No. Kav	
No. Pol	
Keterangan	MENGHADAP PINTU I SENAYAN
Kelurahan	GELORA
Kecamatan	TANAH ABANG
Wilayah	JAKARTA PUSAT
Tanggal Datar	01-July-2014

2:56 PM 7/2/2014

## Lampiran 32 Rekapitulasi Hasil Akhir Wajib Pajak

DATA AWAL PEMUTAKHIRAN OK 2014.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

Security Warning Automatic update of links has been disabled Enable Content

M1220 PINDAH KE PI Lt. 1

REKAPITULASI DATA HASIL AKHIR PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK DAERAH			
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT			
TAHAP II			
NAMA OUTLET	ALAMAT	PEMILIK	ALAMAT PEMILIK
YANI INTERNASIONAL HOTEL	RADEN SALEH NO. 35 CIKINI	YANI SUNARSO	JLN. MAWAR MERAH V/4 NO. 14
WISMA MALUKU	KEBON KACANG RAYA NO.20	JEMMY KWANNANDAR	JL. CIKINI RAYA NO. 60 BC
LAMPUNG	KEBON KACANG I/30	ABUBAKAR ABDULLAH K.KAC	KH. WAHID HASYIM NO. 63
TATOR HOTEL	JAKSA NO. 37	NY.IDA SYAMSIDAR	JL. H AGUS SALIM NO. 24
STUDIO ONE RUMAH KOS	TALANG BETUTU NO. 15	PT. STUDIO ONE	KRAMAT SENTIONG NO.L 39
SMART HOTEL	JL.TANJUNG KARANG NO 2	PT.BEST HARVEST NUSANTARA	JL. KH.WAHID HASYIM NO. 69
SENIEN INDAH HOTEL	BUNGUR BESAR NO. 157	PT.HOTEL SENTRARIA ALIA SENIEN INDAH	JL.SUDIRMAN, PINTU I SENAYAN, FX RESIDENC
RUMAH KOS	LOMBOK NO. 57	VENTJE CHANDRAPUTRA	KEMAYORAN KETAPANG NO. 16
PURI KWITANG HOTEL	KRAMAT KWITANG I NO.11 A	PURI KWITANG HOTEL	PEGANGSAAN NO 2
PETAMBURAN I HOTEL / KALISMA	KS. TUBUN NO. 15-17	PT. SENIEN INDAH PLAZA	MH. THAMRIN KAV. 28-30, PLAZA INDONESIA
N 1 HOTEL	KS. TUBUN NO. 3	PT. HOTEL ROYAL VALINDO	GARUDA NO 8
MULIA SENAYAN HOTEL	ASIA AFRIKA, SENAYAN	PT. MULIA INTAN LESTARI	TAMAN PANTAI INDAH JAYA ANCOL
MENTENG II HOTEL	CIKINI RAYA NO. 105	PT. MENTENG SARANA WISATA	MUARA KARANG BLK E6 S NO.21
MEGA CIKINI HOTEL	CIKINI RAYA NO. 62 - 64	PT. CITRAPURI BHUMICKINI	JAKSA NO. 5
MAXIM HOTEL	KWITANG RAYA NO. 11	PT. HOTEL MAXIM ASRI	KAV PTB DKI BLOK C III/1 JAKARTA TIMUR
KRESNA HOSTEL	KEBON SIRIH TIMUR DALAM I NO.75	ZULFAHMI	KH. MAS MANSYUR NO.50
KERATON AT THE PLAZA A LUXURY COLLECTION	JL. MH. THAMRIN KAV. 15 THE PLAZA	PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBK	KEBON SIRIH BARAT DALAM NO. 35
KALI BARU WISMA	KALIBARU TIMUR III NO.36	MARIFAH	RADEN SALEH NO. 2
JOHNS PARDEDE INT'L HOTEL	RADEN SALEH I NO.37	PT. JHONNY PARDEDE / RONAL SITOMPUL	SALEMBA RAYA NO.26
JODI HOSTEL	JAKSA NO. 35	JODI HOSTEL	THAMRIN CITY LT 6 BLOK HT NO 1


DATA AWAL TAHAP 2 REKAP HASIL HOTEL (2) REKAP HASIL HOTEL REKAP TAHAP 1 REKAP TAHAP 2 (2) REKAP TAHAP 2 REI

Select destination and press ENTER or choose Paste

50%

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Permohonan PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,  
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
 Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486  
 Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **3114/UN39.12/KM/2014**

Lamp. : 1 lembar

H a l : **Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan**

**19 Mei 2014**

**Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**  
**U/P Sudin Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat**

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


Jurusan	: Ekonomi dan Administrasi
Fakultas	: Ekonomi
Sebanyak	: 3 Orang (Ricky Dharmawan S, dkk) Daftar Nama Terlampir.
Untuk Mengadakan	: <b>Praktek Kerja Lapangan</b>
Dalam Rangka	: Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
No. Telp/HP	: 08999289740

Di : **Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt.9,**  
**Jl. Abdul Muis, No.66, Gambir, Jakarta Pusat 10160**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Tembusan :**


1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi



Kepala Biro Administrasi  
 Akademik dan Kemahasiswaan,

*[Signature]*  
**Drs. Syaifullah**  
 NIP 195702161984031001

## Lampiran 2 Surat Persetujuan PKL



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. (021) 3865580 - 85  
 JAKARTA PUSAT

---

Nomor : 636 /-082 30 Mei 2014  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan izin Pendidikan Sistem Ganda / Magang Kepada : Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat  
 Yth. di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta 3114/UN39.12/KM/2014 perihal Permohonan Praktek Kerja Siswa, yang namanya tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	NOMOR INDUK
1.	Rangga Dian Pramana	8105123240
2.	Ricky Dharmawan Samsu	8105123254
3.	Ridho Setia Putra	8105123246

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Pendidikan Sistem Ganda / Magang selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 s.d 23 Juli 2014 di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan untuk menerima dan memberikan bimbingan kepada siswa/i dimaksud pada Unit Kerja Saudara.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, Saya ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


  
 Drs. M. Taufik Hidayat, M.Si  
 NIP 19591028 198002 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Universitas Negeri Jakarta



## Lampiran 3 Daftar Hadir PKL



*Building  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS EKONOMI**

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

---

**DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

..... SKS

Nama : RANEGA DIAN PRAMANA

No.Registrasi : 8109123240


Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI RBB 2012

Tempat Praktik : SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT

Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUHS NO.66 / 021 - 3865580

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 23 Juni 2014	1.	
2.	Selasa, 24 Juni 2014	2.	
3.	Rabu, 25 Juni 2014	3.	
4.	Kamis, 26 Juni 2014	4.	
5.	Jumat, 27 Juni 2014	5.	
6.	Senin, 30 Juni 2014	6.	
7.	Selasa, 1 Juli 2014	7.	
8.	Rabu, 2 Juli 2014	8.	
9.	Kamis, 3 Juli 2014	9.	
10.	Jumat, 4 Juli 2014	10.	
11.	Senin, 7 Juli 2014	11.	
12.	Selasa, 8 Juli 2014	12.	
13.	Kamis, 10 Juli 2014	13.	
14.	Jumat, 11 Juli 2014	14.	
15.	Senin, 14 Juli 2014	15.	


Jakarta 23 Juli 2014



*DAFTAR*

**Catatan:**  
Format ini dapat digunakan sesuai kebutuhan  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan

## Lampiran 4    Daftar Hadir PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

*Building Future Leaders*

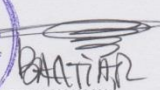
---

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**


Nama : RANEGA DIAN PRAMANA<sup>SKS</sup>  
 No.Registrasi : 0105123240  
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI '12  
 Tempat Praktik : SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
 Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUHS No.66 / 021.3865580

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Sabtu, 15 Juli 2014	1.	
2.	Rabu, 16 Juli 2014	2.	
3.	Kamis, 17 Juli 2014	3.	
4.	Jumat, 18 Juli 2014	4.	
5.	Senin, 21 Juli 2014	5.	
6.	Selasa, 22 Juli 2014	6.	
7.	Rabu, 23 Juli 2014	7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

23 Juli 2014




**Catatan:**  
 Format ini dapat digunakan sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan





## Lampiran 5 Penilaian PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285  
[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

*Building Future Leaders*

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

**2 SKS**

Nama : RANGGA DIAN PRAMANA  
 No.Registrasi : 8105123240  
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI / PENDIDIKAN AKUNTANSI RE5 '12  
 Tempat Praktik : SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK 1 JAKARTA PUSAT  
 Alamat Praktik/ Telp : Jl. ABDUL MUIS NO.66 / 021. 3865580

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	82	1. Keterangan Penilaian:				
2	Kedisiplinan	79	Skor    Nilai    Predikat				
3	Sikap dan Kepribadian	80	80-100    A    Sangat Baik				
4	Kemampuan Dasar	80	70-79    B    Baik				
5	Keterampilan Menggunakan Fasilitas	79	60-69    C    Cukup				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	80	55-59    D    Kurang				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	80	Nilai rata-rata:				
8	Aktivitas dan Kreativitas	79	$\frac{798}{10} = 79.8$				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	79	Nilai Akhir:				
10	Hasil Pekerjaan	80	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Angka Bulat</td> <td style="text-align: center;">Huruf</td> </tr> </table>	80	A	Angka Bulat	Huruf
80	A						
Angka Bulat	Huruf						
<b>JUMLAH</b>		<b>798</b>					

Jakarta, 23 Mei 2014

Penilai

*Catatan :*  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi/perusahaan

# Lampiran 6 Jadwal PKL

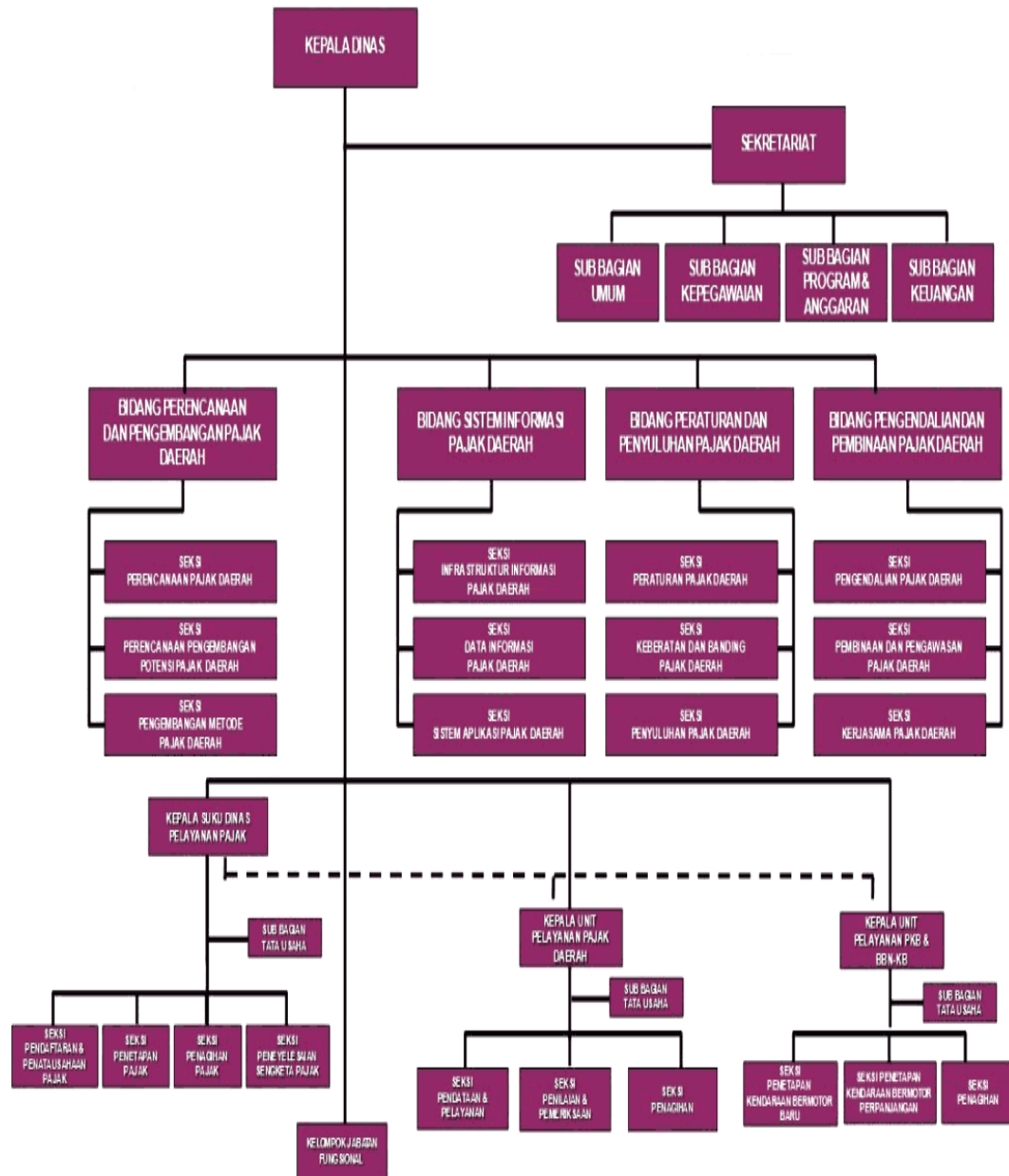
JADWAL ORIENTASI PRAKTEK KERJA LAPANG  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Tanggal 23 Juni s.d 23 Juli 2014

NO	NAMA	NIM	TEMPAT DAN TANGGAL ORIENTASI PKL				KETERANGAN
			SUBBAG TU	PENAGIHAN PAJAK	P 3 D	PENETAPAN	
1	Ridho Setia Putra	8105123246	23 s.d 27 Juni 2014	30 Juni s.d. 4 Juli 2014	7 s.d. 11 Juli 2014	14 s.d. 18 Juli 2014	21 s.d. 23 Juli 2014
2	Ricky Dharmawan Samsu	8105123254					
3	Rangga Dian Pramana	8105123240					

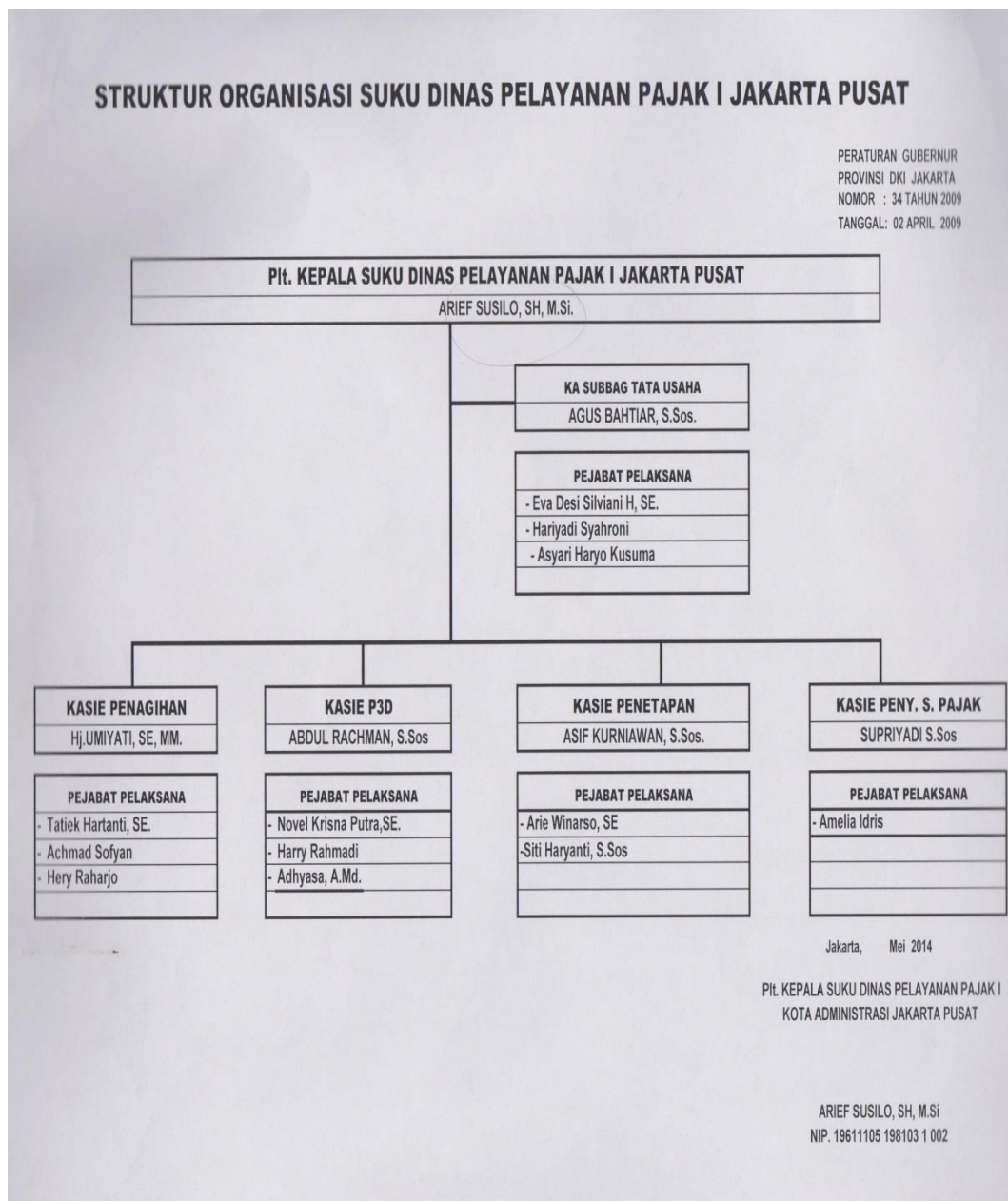
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha  
Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
Agus Bahriar, S.Sos  
NIP. 19591125 198710 1 001

## Lampiran 7 Struktur Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta



Lampiran 8 Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat

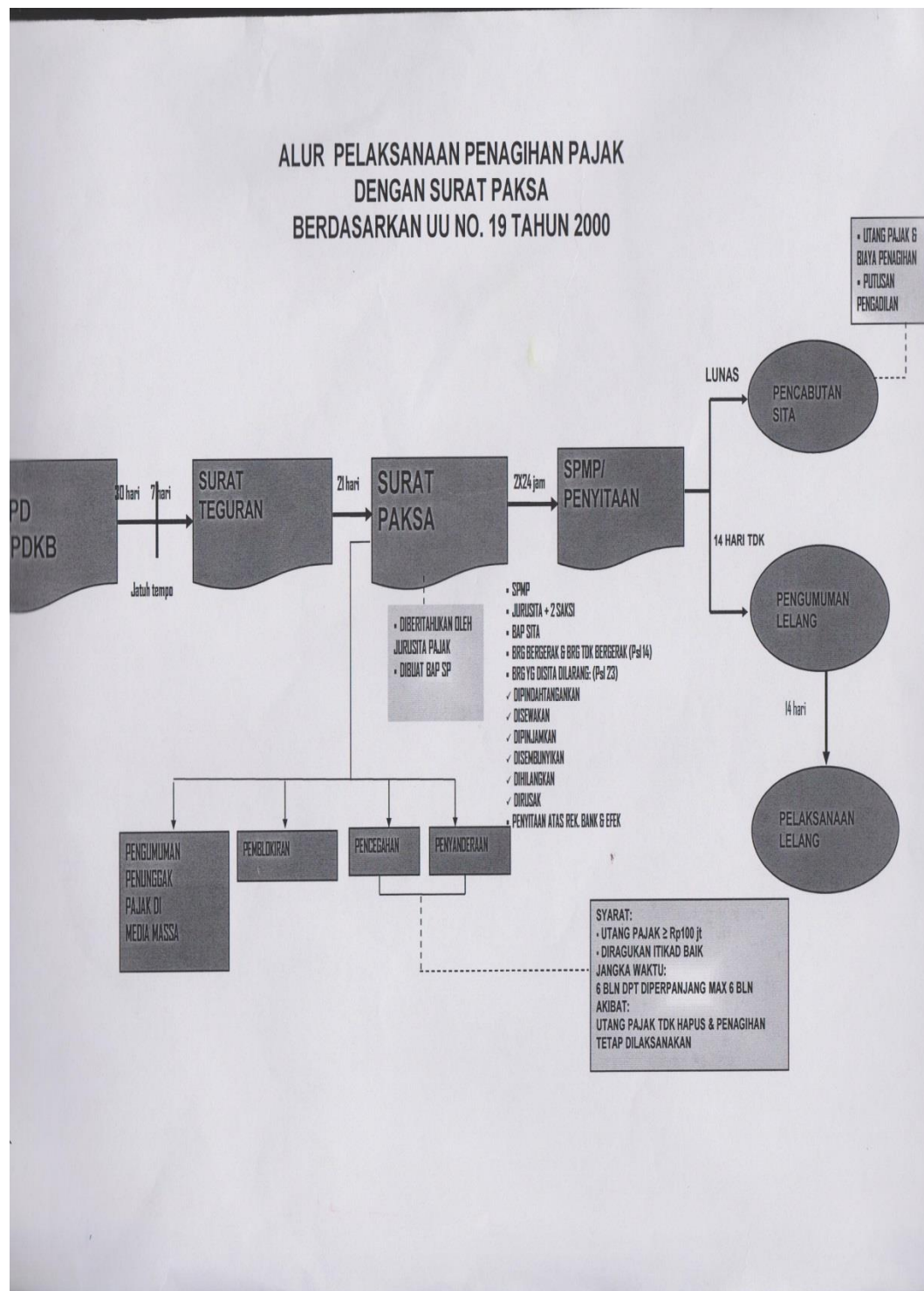


Lampiran 9    Logo





# Lampiran 10 Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak



Lampiran 11 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak



## Lampiran 12 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

IX

EVALUASI KINERJA PENCAIRAN PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2014  
S.D. BULAN JUNI 2014

SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG TAHUN LALU				PIUTANG TAHUN BERJALAN			
		SALDO PIUTANG	PEMBAYARAN	KEBERATAN	SISA	PIUTANG	PEMBAYARAN	KEBERATAN	SISA
1	PAJAK HOTEL	2.078.550.494,14	890.302.272,00	9.746.300,00	1.178.501.922,14	238.659.572,00	214.160.909,00	-	24.498
2	PAJAK RESTORAN	28.031.763.553,89	6.310.274.138,00	880.847.813,00	20.840.641.602,89	5.467.199.059,00	1.104.465.003,00	-	4.362.73
3	PAJAK HIBURAN	6.391.017.151,95	2.644.664.920,00	436.308.924,00	3.310.043.307,95	1.222.546.952,00	1.138.018.428,00	-	84.528
4	PAJAK REKLAME	12.923.996.798,00	3.705.060.908,00	62.508.075,00	9.156.427.815,00	20.447.783.071,00	15.222.368.138,00	-	5.225.41
5	PAJAK PARKIR	328.717.579,50	-	-	328.717.579,50	-	-	-	-
Jumlah		49.754.045.577,48	13.550.302.238,00	1.389.411.112,00	34.814.332.227,48	27.376.188.654,00	17.679.012.478,00	-	9.697.17

Plh. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kantor Administrasi Jakarta Pusat  
Arief Syarif, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak  
SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 19691201 1999303 1 003




## Lampiran 13 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH S.D BULAN JUNI 2014													
SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT													
JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN		REALISASI PENERIMAAN										PENCAPAIAN
	SETAHUN	S.D BULAN INI	SETORAN MASA MUNDUR	PERBAIKAN SETORAN	PENCAIRAN TUNGGAKAN	JUMLAH	% SETAHUN	SANKSI ADMINISTRASI	JAMBONG	JUMLAH POKOK PAJAK & DENDA	S.D BULAN INI	SETAHUN	
2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9 = 8:3	10	11	12 = 8+10+11	13	14 = 9:3	
PAJAK HOTEL	534.300.000.000	267.150.000.000	254.675.843.100	23.993.464	869.395.010	255.569.231.574	47,83	153.246.364	-	255.722.477.938	5,67	47,83	
PAJAK RESTORAN	427.000.000.000	213.500.000.000	158.685.802.084	642.651.155	6.848.578.973	166.177.032.212	38,92	1.609.823.826	-	167.786.856.038	7,83	38,92	
PAJAK Hiburan	139.889.000.000	69.945.000.000	51.397.127.747	-	3.249.095.960	54.646.223.707	39,06	458.282.411	-	55.104.506.118	8,13	39,06	
PAJAK REKLAME	147.604.000.000	73.802.000.000	15.755.618.749	-	-	15.755.618.749	10,67	1.353.640.455	12.970.000	17.122.229.204	1,35	10,67	
PAJAK PARKIR	44.800.000.000	22.400.000.000	15.812.183.096	-	-	15.812.183.096	35,30	6.668.526	-	15.818.851.622	0,59	35,30	
JUMLAH	1.293.593.000.000	646.795.000.000	496.326.574.776	666.644.619	10.967.069.943	507.960.289.338	39,27	3.581.661.582	-	511.554.920.920	7,53	39,27	

er Data :  
 Target dan Bidang Renbang  
 Realisasi dan Laporan Bulanan

INDIKATOR PENERIMAAN PERIODIK  
 SURPLUS/DEFISIT Rp. 785.632.710.662

Jakarta, Juli 2014  
 P. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 M. Supriyanto, SH, M.Si  
 51981031002



## Lampiran 14 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

Vl.a.

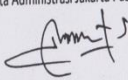
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK DAERAH  
S.D. S.D. BULAN JUNI 2014**

**SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT**

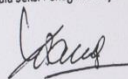
NO	HOTEL			RESTORAN			HIBURAN			PARKIR			REKLAME				
	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	WP AKTIF	BAYAR	TDK BAYAR	BERMASALAH	TERTIBKAN	BAYAR		
	1	2	3 = 2/1	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12 = 11/10	13	14 = 13/12	15	16	17
	202	170	32	1.060	796	264	148	128	20	44	43	1					31
JULI 2014	202	170	32	1.060	796	264	148	128	20	44	43	1					
PROSENTASE	84,16	18,82		9,64	3,20		86,49	13,51		97,73	2,27						

Sumber Data : Laporan Bulanan Sudin

Pt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak

  
SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003

# Lampiran 15 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

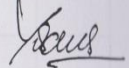
RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014														
LAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT														
JENIS PAJAK	BULAN (Rp)												JUMLAH	PENCANAAN
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES		
HOTEL	45.787.849.582	38.659.440.825	43.354.390.962	45.232.498.047	38.380.035.301	44.155.216.857							255.589.231.574	47,8
RESTORAN	31.951.834.302	23.641.774.254	26.700.873.114	26.082.466.502	28.002.471.411	30.073.455.240							166.452.874.823	38,9
HIBURAN	10.200.638.440	7.182.256.667	7.829.224.548	9.272.189.201	9.130.312.840	11.031.602.011							54.646.223.707	39,0
REKLAME	2.001.398.545	1.048.162.050	3.076.150.025	3.991.245.713	3.237.941.816	2.442.638.100							15.797.536.249	10,7
PARKIR	2.511.967.407	2.731.135.157	2.634.470.058	2.640.300.792	3.028.021.204	2.268.288.478							15.812.183.096	35,3
JUMLAH	92.453.488.278	71.282.768.953	83.694.108.707	87.216.704.255	81.778.782.572	89.968.200.686							508.278.048.448	39,2

Pt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014

Plh. Kepala Seksi Penagihan Pajak



SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003



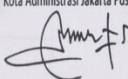
# Lampiran 16 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

**UPAYA - UPAYA PENAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**S.D. BULAN JUNI 2014**

**PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT**

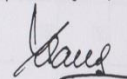
URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
Himbauan/Pemberitahuan	-	-	-	-								
Teguran Belum Melakukan Pemeriksaan Massa	57	2	56	11	109							
Teguran Terlambat melaporkan D	-	-	-	-		121						
Teguran SKP Jatuh Tempo	26	94	15		14							
Tagihan Pajak Daerah	291	-	362	331	249							
Pemanggilan Wajib Pajak	-	7	-	-	1							

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

Jakarta, Juli 2014  
Plt. Kepala Seksi Penagihan Pajak



SUPRIYADI, S. Sos  
NIP. 1969120119993031003

## Lampiran 17 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

# REKAP NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH


## S.D BULAN JUNI 2014

Sudin :

### PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

JENIS PAJAK	TARGET PENE MAAN	JML WP AKTIF	BULAN LALU			BULAN INI			S.D DENGAN BULAN INI			
			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			
			NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	NOTA PERHITUN GAN	WP	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PAJAK HOTEL	534,3	1,000,000	202	4	3	199,903,594	1	1	(481,801)	5	4	199,421,79
PAJAK RESTORAN	427,0	1,000,000	1060	44	27	4,305,917,946	2	1	41,023,453	46	28	4,346,941,39
PAJAK HIBURAN	139,8	1,000,000	148	5	3	965,792,062	0	0		5	3	965,792,06
INSIDENTAL			0	53	50	2,971,660,302	16	16	598,838,150	69	66	3,570,498,45
PAJAK PARKIR	44,8	1,000,000	44	0	0		0	0		0	0	
PAJAK REKLAME	147,6	1,000,000	126	143	143	14,684,297,299	13	13	2,851,869,594	156	156	17,536,166,89
PAJAK PBB							0	0		0	0	
JUMLAH	1,293,5	1,000,000	1,580	249	226	23,127,571,203	32	31	3,491,249,396	281	257	26,618,820,599

KEPALA SEKSI PENETAPAN PAJAK  
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT



ASIF KURNIAWAN  
NIP. 19720314 199303 1 008

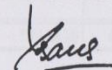
## Lampiran 18 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

**EVALUASI KEBERATAN/PENGURANGAN/KERINGANAN PAJAK DAERAH**  
**S.D. BULAN JUNI 2014**

Sudin : Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat

No	JENIS PAJAK	JUMLAH			% PENCAPAIAN	NILAI ( Rp )
		PERMOHONAN WP	DIPROSES	SELESAI		
1	2	3	4	5	6=5:3	7
1	HOTEL	2	1	1	50	Rp. 9,746,300.00
2	RESTORAN	10	2	8	80	Rp. 420,300,001.00
3	HIBURAN	5	-	5	100	Rp. 203,275,719.00
4	REKLAME	10	-	10	100	Rp. 529,219,585.00
5	PARKIR	-	-	-	-	Rp. -
6	PBE	4	-	4	100	Rp. 4,199,047,918.00
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>90</b>	<b>Rp. 5,361,589,523.00</b>

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK  
 SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT



SUPRIYADI, S. Sos  
 NIP. 19691201 199303 1 003



## Lampiran 19 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

REALISASI PENYERAPAN KEGIATAN SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT S/D JUNI 2014								
NO.	URAIAN KEGIATAN	REALISASI S/D BULAN INI						
		Jumlah Anggaran	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Anggaran (SP2D)		Realisasi Administrasi (SPJ)		% Realisasi Fisik (Kegiatan Terlaksana)
				Nilai Penyerapan	%	Nilai Administrasi	%	
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8 = 7/3	9
	<b>1.20.40. Program Pelayanan Pajak Daerah.</b>	<b>2.035.000.000</b>		<b>974.587.015</b>	<b>48</b>	<b>247.247.490</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
001	Rakor Pemungutan PBB di Tingkat Kota Administrasi	100.000.000	Pebruari-Desember	50.098.990	50	-	-	-
002	Pekan Panutan PBB di Wilayah Kota Administrasi	125.000.000	September	124.998.940	100	-	-	-
003	Partisipasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I dalam rangka Macan Kemayoran Expo	100.000.000	September	99.993.465	100	-	-	-
004	Partisipasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I dalam rangka Jakarta Pusat Fair	50.000.000	Juni	-	-	-	-	-
005	Koordinasi Pendataan dan Penerbitan Reklame di Wilayah Sudin PP I Jakarta Pusat	200.000.000	Pebruari-Desember	69.651.260	35	-	-	-
006	Koordinasi Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah	150.000.000	Mei-September	74.944.980	50	-	-	-
007	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah	200.000.000	Juni	199.900.420	100	156.696.790	78	-
008	Rekonsiliasi dan Konfirmasi Pembayaran di Wilayah Sudin Pelayanan Pajak I Kota Adm. Jak Pus	120.000.000	Januari - Desember	59.999.530	50	29.478.300	25	-
009	Koordinasi Pencairan Tunggalan Pajak Daerah Lainnya di Wil. Sudin Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	75.000.000	50	36.654.100	24	-
010	Supervisi dan Pemeriksaan Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas PP I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	74.999.970	50	-	-	-
011	Pengawasan dan Pemeriksaan Hiburan Insidental di Wilayah Sudin PP I Jakarta Pusat	150.000.000	Januari - Desember	74.999.700	50	-	-	-
012	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Online System	100.000.000	Januari - Desember	49.999.960	50	24.418.300	24	-
013	Pelaksanaan Silent Operation Pajak Daerah setelah Online System	400.000.000	Januari - Desember	-	-	-	-	-
014	Pelatihan CMS kepada Wajib Pajak Daerah	40.000.000	Januari - Desember	19.999.800	50	-	-	-
	<b>Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor</b>	<b>165.000.000</b>		<b>77.011.985</b>	<b>47</b>	<b>2.047.635</b>	<b>1</b>	
001	Penyediaan Kerumahaan Sudin Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat	100.000.000	Januari - Desember	49.994.350	50	-	-	-
002	Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja	50.000.000	Januari - Desember	24.970.000	50	-	-	-
003	Penyediaan Jasa Internet	15.000.000	Januari - Desember	2.047.635	14	2.047.635	14	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.200.000.000</b>		<b>1.051.599.000</b>	<b>48</b>	<b>249.295.125</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Jakarta, 30 Juni 2014  
KASUBAG TATA USAHA SUDIN PELAYANAN PAJAK I  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

AGUS BACHTIAR, S.Sos  
NIP. 19591125 198710 1 001

## Lampiran 20 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

XI.

**EVALUASI PROGRAM KERJA**  
**S.D. BULAN MEI**

SUDIN : PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT

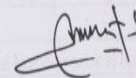
NO	URAIAN KERJA	TARGET WAKTU	VOLUME	TAHAPAN PELAKSANAAN YANG DILAKUKAN	OUTPUT (HASIL)
I.	18 Strategi				
1	Pemeriksaan Lengkap Objek Pajak Daerah	Jan-Des		1. Menyusun prognosa penerimaan per wajib pajak	Rencana potensi penerimaan
a.	Pajak Hotel			2. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan	rencana ketetapan
b.	Pajak Restoran			3. Menyusun daftar wajib pajak yang akan diperiksa	Daftar WP yang akan diperiksa
c.	Pajak Hiburan			4. Menerbitkan surat tugas pemeriksaan	Surat Tugas
d.	Pajak Parkir			5. Melakukan pemeriksaan	KKP
e.	Pajak Reklame			6. Membuat laporan hasil pemeriksaan	LHP
				7. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak	SKPD
2	Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jan-Des			
3	Penagihan Piutang Pajak dengan Surat Paksa	Jan-Des		1. Menyusun dan meneliti daftar tunggakan wajib pajak	Daftar Tunggakan/Piutang
				2. Melakukan konfirmasi tunggakan dengan wajib pajak	Surat Pemberitahuan Konfirmasi
				3. Mengirimkan surat-surat penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan	Surat Teguran, STPD
				4. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penagihan dengan surat paksa	Surat Paksa
4	Menguatkan Komitmen Aparat	Jan-Des		1. Membuat laporan kehadiran pegawai	BA Daftar Hadir Pegawai
				2. Melakukan Pertemuan Rutin setiap hari senin	Meningkatkan komitmen/kinerja
5	Pelayanan Prima	Jan-Des		1. Menerbitkan surat tugas dan jadwal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Walikota Jakarta Pusat dan gerai pajak senayan city	Surat Tugas
				2. Melakukan pelayanan sesuai jadwal	Menerima SSPD dan SPTPD
				3. Lain-lain pelayanan kepada wajib pajak	yang telah divalidasi dan di ttd
II	Rencana Program Renstra DPP				
1	Rakor Pemungutan PBB	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
2	Pekan Panutan PBB	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
3	Partisipasi Sudin PP I JP dlm rangka Macan	Sept		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan



## Lampiran 21 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

NO	URAIAN KERJA	TARGET WAKTU	VOLUME	TAHAPAN PELAKSANAAN YANG DILAKUKAN	OUTPUT (HASIL)
	Kemayoran Expo				
4	Partisipasi Sudin dlm rangka Jakarta Pusat Fair	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
5	Koordinasi Pendataan dan Penertiban Reklame	Feb-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
6	Koordinasi Pemutakhiran data Objek dan Subjek	Mei-Sept		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
7	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Juni		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
8	Rekonsiliasi dan Konfirmasi Pembayaran	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
9	Koordinasi Pencairan Tunggakan Pajak	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
10	Supervisi dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
11	Pengawasan dan Pemeriksaan Hiburan Isidental	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
12	Monitoring Pembayaran dan Evaluasi Online System	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
13	Pelaksanaan Silent Operation	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan
14	Pelatihan CMS kepada Wajib Pajak	Jan-Des		1. Tahap persiapan- tahap pelaksanaan-tahap pelaporan	Laporan Kegiatan

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



Arief Susilo, SH, M.Si  
NIP. 196111051981031002

## Lampiran 22 Laporan Monitoring dan Evaluasi Wajib Pajak

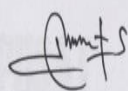
XII.

**PERMASALAHAN DAN UPAYA**

**SUDIN PELAYANAN PAJAK I**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO	PERMASALAHAN	UPAYA	KET
I.	Kegiatan Pemungutan		
1	Kondisi SDM untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan di lapangan masih kurang (Struktur organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak tidak ada seksi pemeriksaan)	1. Melibatkan SDM dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) 2. Perlu penyempurnaan Perda Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan mengakomodir seksi pemeriksaan	
2	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih kurang	1. Melakukan konfirmasi Pembayaran/ Setoran Masa 2. Menerbitkan Surat Teguran	
3	Kurangnya Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan	1. Memberikan penjelasan mengenai ketentuan pajak yg berlaku	
II.	Program Kerja		
1	Pengesahan APBD terlambat, sehingga jadwal kegiatan mundur	1. Melakukan Penyesuaian jadwal kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dan anggaran dapat diserap	

Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
 Arief Susilo, SH, M.Si  
 NIP. 196111051981031002

## Lampiran 23 Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3663360 - 65 FAKS 3663360  
JAKARTA 10160

---

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )  
PAJAK HIBURAN**

Nomor : .....

Unit Pengelola : ..... Suku Dinas Pelayanan Pajak .....

(Diisi oleh petugas)

---

**I. Data Objek Pajak :**

1. Nama Objek Pajak : .....
2. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Kelurahan : .....
4. Kecamatan : .....
5. Kota/Kab. Adm : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. TMT Operasi : .....

**II. Data Wajib Pajak :**

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Badan Hukum : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Nama Pemilik/  
Penanggung Pajak : .....
4. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....
5. Kelurahan : .....
6. Kecamatan : .....
7. Kota/Kab. Adm : .....
8. Nomor Telepon : .....
9. NIK/NPWP : .....
10. NPWPD : .....

**III. Data Usaha :**

1. Status Usaha : ☐ 1. Induk ☐ 2. Cabang
2. Jenis Hiburan :
  - a. Pertunjukan Film, golongan bioskop .....
  - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya .....
  - c. Pagelaran Musik dan Tari .....
  - d. Diskotik .....
  - e. Karaoke .....
  - f. Klub Malam/Bar .....
  - g. Permainan Biliard .....
  - h. Permainan Ketangkasan .....
  - i. Permainan Mesin Keping .....
  - j. Panti Pijat/Refleksi .....
  - k. Spa/Sauna/Mandi Uap .....
  - l. Pertandingan Olah Raga .....
  - m. Selancar Es/Ice Skate .....
  - n. Taman Hiburan/Rekreasi .....
  - o. Hiburan Insidental .....
  - p. Hiburan Lainnya : .....
3. Sifat Pertunjukan : Rutin/Insidental
4. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : ..... m<sup>2</sup> Bangunan : ..... m<sup>2</sup>
5. Luas Tempat Usaha : ..... m<sup>2</sup>
6. Status Kepemilikan Tempat Usaha :
  - a. Milik Sendiri
  - b. Sewa / Kontrak
  - c. Bagi Hasil



## Lampiran 24 Font Pendaftaran SPOPD Pajak Hiburan

2

7. Jam Pertunjukan/Operasi: a. Jam ..... s.d. jam .....  
 b. Jam ..... s.d. jam .....  
 c. Jam ..... s.d. jam .....  
 d. Jam ..... s.d. jam .....
8. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp. ....  
 b. Menggunakan Cover Charges Rp .....  
 c. Kartu Anggota/Members Card Rp .....  
 d. Coin Rp. ....  
 e. Ruangan/Kamar  
 1) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
 2) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
 3) ..... Kamar / Rp. .... / .....  
 4) ..... Kamar / Rp. .... / .....
9. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk .....  
 b. Jumlah Mesin .....  
 c. Jumlah Meja .....  
 d. Jumlah Jalur .....  
 e. ....
10. Fasilitas Penunjang : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak ada  
 b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil ..... unit  
 2). Motor ..... unit  
 c. Pengelola Parkir : .....  
 d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. Izin Pariwisata Nomor ..... masa berlaku .....  
 b. Izin Undang-Undang Gangguan ..... masa berlaku .....  
 c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor ..... masa berlaku .....  
 d. Izin Mengelola Parkir Nomor ..... masa berlaku .....  
 e. Izin Reklame ..... masa berlaku .....  
 f. ....

**IV. Keterangan Lain-lain :**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.


Petugas Penerima, Jakarta, .....  
 Wajib Pajak/Penangguna Pajak,

NIP .....

Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

## Lampiran 25 Font SSPD



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788  
 JAKARTA 10160

---

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
( SSPD )**

---

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....

3. NPWPD : .....

4. NOPD : .....

5. Jenis Pajak : .....

6. Nama Objek Pajak : .....

7. Alamat Objek Pajak : .....

8. Masa Pajak : .....

9. Tahun Pajak : .....

10. Setoran ( beri tanda pada salah satu kotak dibawah ini )

☐ Masa : Bulan : ..... Tahun : .....

☐ SKPD : No. ....

☐ SKPDKB : No. ....

☐ SKPDKBT : No. ....

☐ STPD : No. ....

11. Besar Setoran :

No.	AYAT /KODE REKENING	URAIAN	BESAR SETORAN
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
Jumlah Setoran			Rp.

Terbilang : .....

Ruang untuk teraan mesin  
Kas Register  
  
  

Cap

Diterima oleh :  
 Petugas :  
 Tanggal :  
  
 Tanda tangan :  
 Nama Jelas :

Jakarta,  
  

Penyetor,


(.....)

Nama/Cap/Stempel

PEMBAYARAN SAH, BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER

Lembar 1. Warna Putih untuk Wajib Pajak  
 2. Warna Merah untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPD  
 3. Warna Kuning untuk BPKD / BANK  
 4. Untuk Laporan WP ke Dipenda  
 5. Untuk Arsip





**JAYA RAYA**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DINAS PELAYANAN PAJAK**

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788  
JAKARTA 10160

---

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**( SPPTPD )**  
**PAJAK Hiburan**

Masa Pajak : .....  
Tahun Pajak : .....

**Kepada**  
Yth .....  
di .....  
**Jakarta**

---

**Perhatian :**

- Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri tanda pada kotak ☐ yang bersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
- Keterlambatan Penyerahan SPPTD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

---

**I. Identitas Wajib Pajak :**

a. Nama Objek Pajak : .....

b. Alamat : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos .....

c. Nama Objek/Usaha : .....

d. Alamat : .....

e. NPWPD : .....

---

**II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan :**

Klasifikasi Hotel : ☐ 1. Pertunjukan Film.  
☐ 2. Pertunjukkan Film dan Tari Nasional.  
☐ 3. Pagelaran Musik.  
☐ 4. Diskotik.  
☐ 5. Karaoke.  
☐ 6. Klub Malam/Bar  
☐ 7. Permainan Billiard  
☐ 8. Permainan Ketangkasan  
☐ 9. Permainan Mesin Keping  
☐ 10. Panti Pijat/Refleksi  
☐ 11. Spa/Sauna/Mandi Uap  
☐ 12. Pertandingan Olah Raga  
☐ 13. Selancar Es/Ice Skate  
☐ 14. Taman Hiburan/Rekreasi  
☐ 15. Hiburan Insidentil  
☐ 16. Hiburan Lainnya : .....

---

b). Data Pembayaran :

1). Pembayaran Dari :	Dalam Rupiah
a). Persewaan Ruangan/Kamar	Rp. ....
b). Penjualan Makanan dan Minuman	Rp. ....
c). Cover Charge/Minumum Charge	Rp. ....
d). Penjualan Karcis	Rp. ....
e). Penjualan Fasilitas Lainnya ( dalam satu Bill/Bon )	Rp. ....
f). Penjualan Score/Coin	Rp. ....
g). .....	Rp. ....
2). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) ( jumlah 1.a s.d 1.g )	Rp. ....
a). Tarif Pajak ..... %	Rp. ....
b). Pajak Terutang ( Tarif x DPP )	Rp. ....
c). Sanksi Administrasi	Rp. ....
d). Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar	Rp. ....
e). Pajak Yang Kurang/Lebih Bayar	Rp. ....
f). Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Rp. ....

## Lampiran 26 Excel Tunggalan

**TUNGGAKAN RESTORAN 2014.xlsx - Microsoft Excel (Product Activation Failed)**

**File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View**

**Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing**

**Security Warning** Automatic update of links has been disabled [Enable Content](#)

**BA352**

**DAFTAR TUNGGAKAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN**  
**SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**S.D JUNI 2014**

No	NAMA OBIEK PAJAK	ALAMAT OBIEK PAJAK	NOPO	THN PAJAK	NOMOR KETetapan	MASA PAJAK	TANGGAL SKP TERBIT	TANGGAL SKP JATUH TEMPO	TUNGGAKAN AKHIR	KET
1	2	3	5	6	7	8	9	10	20	21
DAFTAR PUTANG PAJAK RESTORAN YANG DITERIMA TAHUN 2003 DAN TAHUN 2004 YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS										
1	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1995	43.3.1				41,877,273.00	Kedaluarsa
2	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1994	43.3.1				23,113,398.00	Kedaluarsa
3	RM TAICHAN JAF	Mid Plaza Jl. Jend. Sudirman	101.99.05.05.0912	1993	43.3.1				8,079,679.00	Kedaluarsa
4	RM TAICHAN	Jl. Iskandarsyah II/2		2002					8,427,260.00	SUDIN SELATAN 1
5	RM RADEN KURNI	Jl. Raden Saleh No. 62		1994	43.3.1				972,867.37	UPPD SENEN
6	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		1999	43.3.01.08.10.00009				104,631,164.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
7	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		1998					62,268,798.00	UPPD MENTENG
8	RM MAXIST CUCI	Jl. MH. Thamrin PL		2000					35,539,042.00	UPPD MENTENG
9	CAFE JAYAPUB	Jl. MH. Thamrin		1993	43.3.02.01.15.0002				9,850,597.00	UPPD MENTENG
10	CAFE JAYAPUB	Jl. MH. Thamrin		1994					5,074,450.00	UPPD MENTENG
11	RM PETES TAVEI	Jl. MH. Thamrin Kav.3		1995	43.3.1				120,088,010.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36271-1.723
12	RM PETES TAVEI	Jl. MH. Thamrin Kav.3		1994					46,613,456.00	UPPD MENTENG
13	CAFE GREEN PUE	Jl. Moh. Thamrin No.9		1994	43.3.1				4,682,755.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
14	CAFE GREEN PUE	Jl. Moh. Thamrin No.9		1995					3,622,034.00	UPPD MENTENG
15	RM IKAN BAKARI	Jl. Cikiri Raya No. 73		1995	43.3.1				17,598,135.00	UPPD MENTENG Turup OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36254-1.723
16	RM IKAN BAKARI	Jl. Cikiri Raya No. 73		1993					6,552,000.00	UPPD MENTENG Turup
17	RM FUNAWAN	Jl. Mh. Thamrin No.59		1994	43.3.1				3,141,290.50	UPPD MENTENG
18	RM FUNAWAN	Jl. Mh. Thamrin No.59		1995					1,724,526.50	UPPD MENTENG
19	RM PHO PHO	Jl. H. Agus Salm		1997	43.3.1				3,083,787.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36234-1.723
20	RM MALLUEES	Plaza Indonesia		1995	43.3.1				4,746,204.44	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36221-1.723
21	RM TORIGIN	Jl. Hos Cokroaminoto No. 81		1994	43.3.1				676,998.00	UPPD MENTENG OBJEK TDK DITEMUKAN, KONF NO. 36211-1.723
22	RM SARINAH FDI	Jl. MH. Thamrin No. 11		1995	43.3.1				7,628,408.00	UPPD MENTENG
23	KUK BING RESTORAN	Jl. Sudirman No. 44.45.46		1999	15.09.08.12.0004.2002.0	13.01.2002	25.01.04	*****	24,272,710.00	UPPD MENTENG

**REKAP APR MEI 2014** / **McDonald** **REKAP MEI JUN 2014** **REKAP JUN 2014** Sheet1

Ready

## Lampiran 27 Excel Monitoring

TUNGGAKAN JUNI 2014-HTL-HIB-REK-PKR.xlsx - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Calibri 11 A A Wrap Text General

Paste B I U Conditional Formatting Table Styles Insert Delete Format

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

A44

DAFTAR TUNGGAKAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL

SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT

PERIODE : JUNI 2014

No.	AMA WAJIB PAJAL	AMAT WAJIB PAJAL	Menis Paja	Nama Usaha	Alamat Usaha	NOPD/NPWP	Nomor Ketetapan	Masa Pajak	Tanggal SKPD	SISA TUNGGAKAN					
								Bulan	Tahun	Terbit	J.Tempo	POKOK	KENAIKAN	BUNGA	SANKSI / PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				HOTEL MUSANTARA HOTEL	Jl. KH Mas Mansyur No.36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2003.5/H	Jan -Des '03	2003	26-Jul-06	25-Aug-06	43,125,538.30	-	-	18,312,661.79
2				HOTEL MUSANTARA HOTEL	Jl. KH Mas Mansyur No.36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2004.5/H	Jan -Des '04	2004	26-Jul-06	25-Aug-06	50,104,782.80	-	-	21,430,434.30
3				HOTEL MUSANTARA HOTEL	Jl. KH Mas Mansyur No.36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2005.5/H	Jan -Des '05	2005	26-Jul-06	25-Aug-06	66,520,507.75	-	-	25,881,162.33
4				HOTEL MUSANTARA HOTEL	Jl. KH Mas Mansyur No.36	43.3.01.06.01.00002	3.002.12/004.2006.5/H	Jan -April '06	2006	26-Jul-06	25-Aug-06	4,822,050.00	-	-	3,797,610.09
5				<b>Sub Total 2006</b>								<b>104,652,880.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,421,858.51</b>
1				HOTEL KALISMA HOTEL	Jl. KS. Tubun No. 15-17	43.3.01.04.01.00001	3.009.12/004.2005.5/H	2005	2005	2007/2007	19/09/2007	-	-	-	5,990,006.24
2	PT. ATLANTIC PERM	Jl. Salemba Raya No. 26	HOTEL	ATLANTIK HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2006.5/H	2006	23/7/2007	22/08/2007		31,602,901.00	7,900,745.00	9,006,635.00	10,707,072.56
3	PT. ATLANTIC PERM	Jl. Salemba Raya No. 26	HOTEL	ATLANTIK HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2006.5/H	2005	23/7/2007	22/08/2007		56,179,246.00	14,044,812.00	25,542,756.00	19,796,062.04
4	PT. ATLANTIC PERM	Jl. Salemba Raya No. 26	HOTEL	ATLANTIK HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002	3.020.12/004.2004.5/H	2004	23/7/2007	22/08/2007		43,867,791.00	10,966,940.00	21,056,535.00	15,546,734.24
5	PT. ATLANTIC PERM	Jl. Salemba Raya No. 26	HOTEL	ATLANTIK HOTEL	Jl. Salemba Raya No. 26	43.3.03.02.01.00002		2003	23/7/2007	22/08/2007		15,638,241.00	3,809,560.00	7,506,356.00	5,542,182.40
6				<b>Sub Total 2007</b>								<b>147,280,229.00</b>	<b>36,822,057.00</b>	<b>63,112,272.00</b>	<b>57,582,067.40</b>
1	PT. ATLANTIC PERM	Jln. Salemba Raya No.26	HOTEL	HOTEL ATLANTIC PERM	Jln. Salemba Raya No.26	43.3.02.01.01.00002	3.006.12/006.2007.5	Jan -Des '07	2007	13-Feb-09	14-Mar-09	36,332,216.00	9,233,054.00	13,327,331.00	7,386,443.00
2	PT. ATLANTIC PERM	Jln. Salemba Raya No.26	HOTEL	HOTEL ATLANTIC PERM	Jln. Salemba Raya No.26	43.3.02.01.01.00002	3.006.12/006.2008.5	Jan -Juni '08	2008	13-Feb-09	14-Mar-09	24,020,791.00	6,006,180.00	4,379,785.00	4,804,159.00
3				<b>Sub Total 2008</b>								<b>60,353,006.00</b>	<b>15,239,232.00</b>	<b>17,707,116.00</b>	<b>12,190,601.00</b>
1	YAYASAN PHIKVITTA	Jl. Kwiwang Raya No. 19	HOTEL	WISMA PHIKVITANG	Jl. Kwiwang Raya No. 19	NOPD/01.03.04.07.04	01.03.04.015.112.2006	Jan -Des '06	2006	19-Ago-10	18-Dec-10	1,943,146.00	287,287.00	689,493.00	-
2	YAYASAN PHIKVITTA	Jl. Kwiwang Raya No. 19	HOTEL	WISMA PHIKVITANG	Jl. Kwiwang Raya No. 19	NOPD/01.03.04.07.04	01.03.04.015.112.2007	Jan -Des '07	2007	19-Ago-10	18-Dec-10	3,359,558.00	839,642.00	2,016,141.00	-
3	YAYASAN PHIKVITTA	Jl. Kwiwang Raya No. 19	HOTEL	WISMA PHIKVITANG	Jl. Kwiwang Raya No. 19	NOPD/01.03.04.07.04	01.03.04.015.112.2008	Jan -Des '08	2008	19-Ago-10	18-Dec-10	4,521,085.00	1,130,236.00	2,712,710.00	-
4	YAYASAN PHIKVITTA	Jl. Kwiwang Raya No. 19	HOTEL	WISMA PHIKVITANG	Jl. Kwiwang Raya No. 19	NOPD/01.03.04.07.04	01.03.04.015.112.2009	Jan -Des '09	2009	19-Ago-10	18-Dec-10	1,085,570.00	271,493.00	624,433.00	-
5				<b>Sub Total 2010</b>								<b>10,114,371.00</b>	<b>2,528,718.00</b>	<b>6,041,774.00</b>	<b>-</b>
1	CY BINTANG JOHAN NARADA	NO. 29	HOTEL	HOTEL BINTANG JOHAN NARADA	NO. 29	101.05.04.09.0078	03.10.04.09.012.2001	JAN-DES '12	2012	28-Mar-13	25-Apr-13	1,505,120.00	-	322,764.00	-
2	CY BINTANG JOHAN NARADA	NO. 29	HOTEL	HOTEL BINTANG JOHAN NARADA	NO. 29	101.05.04.09.0078	04.10.04.09.011.0001	SEP-DES '11	2011	26-Mar-13	25-Apr-13	3,083,464.00	-	952,912.00	-
3	BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	HOTEL	HOTEL BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2003	JAN-DES '07	2007	23-Dec-13	22-Jan-14	131,631,671.00	-	63,883,204.00	-
4	BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	HOTEL	HOTEL BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2005	JAN-DES '08	2008	23-Dec-13	22-Jan-14	132,006,635.00	-	63,747,281.00	-
5	BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	HOTEL	HOTEL BUMI JOHAR	JL. JOHAR NO. 17-19	101.07.04.07.0164	12.10.04.07.012.2004	JAN-FEB '09	2009	23-Dec-13	22-Jan-14	22,005,607.00	-	10,562,692.00	-
6				<b>Sub Total 2011</b>								<b>8,794,000.00</b>	<b>2,180,500.00</b>	<b>2,610,740.00</b>	<b>-</b>

Ready



## Lampiran 28 Reklame



Teks Reklame : PRODUK BENTOEL / DUNHILL  
Alamat Pemasangan : Jl. Inspeksi Karet Pasar Baru Timur

## Lampiran 29 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us x Forum Komunikasi DPP x REKLAME DPP DKI JAKARTA x SIM REKLAME DPP DKI JAK...

10.15.90.9/reklame/index.php/daftar/index

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Pendaftaran Reklame

PENDAFTARAN BARU PENDAFTARAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BDU

Nomor Pendaftaran :

Nama Pemohon :

Tanggal Daftar :  sd.

Cari

1 2 3 > AKHIR >

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA PEMOHON	TEKS REKLAME	JENIS	ALAMAT REKLAME	TANGGAL DAFTAR		
1	201410100192	PT. MEDIA INDRA BUANA	PRODUK HM SAMPOERNA	LED (LIGHT EMITTING DIODE)	JLN. ASIA AFRIKA/PINTU IX	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
2	201410100191	PT. AVABANINDO PERKASA	PRODUK BANK MANDIRI	LED (LIGHT EMITTING DIODE)	JLN. M.H. THAMRIN	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
3	201410100188	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	LOGO MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
4	201410100187	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	LOGO MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
5	201410100189	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	HURUF TIMBUL MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
6	201410100190	MEDIA NUSANTARA CITRA, PT	HURUF TIMBUL MNC	PAPAN	JLN. KEBON SIRIH	01-July-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
7	201410100186	PT. PLAZA INDONESIA REALTY	THE BLESSINGS OF RAMADHAN - CITI BANK	KAIN	JLN. M.H. THAMRIN	30-June-2014	VIEW	UPDATE DATA WP
8	201410100185	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PRODUK BANK BNI	PAPAN	JLN. INSPEKSI/KARET PS BARU TIMUR	30-June-2014	VIEW	UPDATE DATA WP

Waiting for asrv-a.akamaihd.net... BNIISA PRODUK SUPER JLN. KH. MAS

2:15 PM 7/2/2014

## Lampiran 30 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us Forum Komunikasi DPP REKLAME DPP DKI JAKARTA REKLAME DPP DKI JAKARTA

10.15.90.9/reklame/index.php/izin/index Google

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Surat Izin Reklame

PROSES PERIZINAN

No Izin :

NOPD :

Nama Pemohon :

Cari

1 2 3 > AKHIR >

NO	NO IZIN	TGL IZIN	NAMA PEMILIK	TEKS REKLAME	LOKASI REKLAME
----	---------	----------	--------------	--------------	----------------

2:55 PM 7/2/2014

## Lampiran 31 Sistem Informasi Manajemen Reklame

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Mandiri - Contact Us x Forum Komunikasi DPP x REKLAME DPP DKI JAKARTA x REKLAME DPP DKI JAKARTA x +

10.15.90.9/reklame/index.php/daftar/view/201410100192

Google

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME**  
DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA

NOVEL KRISNA PUTRA [LOGOUT]

PENDAFTARAN PERMOHONAN KETETAPAN PERIZINAN LAPORAN ADMIN

### Detail Pendaftaran

[KEMBALI KE PENDAFTARAN](#) [CETAK PENDAFTARAN](#)

No Pendaftaran	201410100192
No Izin Sebelumnya	
Nama Pemohon	PT. MEDIA INDRA BUANA
Alamat Pemohon	JL. BENDUNGAN HILIR RAYA G II 10 B
Nama yg Dikuasakan	IDEM
Alamat yg Dikuasakan	IDEM
No. Telp/HP	021 573 3566
Teks Reklame	PRODUK HM SAMPOERNA
Luas	72 m2
Muka	1 muka
Kode Jenis	0107
Status Pasang	BARU
Jenis	L E D (LIGHT EMITTING DIODE)
Lokasi	RUANG NON PEMDA
Alamat Reklame	POS1 JLN. ASIA AFRIKA/PINTU IX
No. Kav	
No. Pol	
Keterangan	MENGHADAP PINTU I SENAYAN
Kelurahan	GELORA
Kecamatan	TANAH ABANG
Wilayah	JAKARTA PUSAT
Tanggal Datar	01-July-2014

2:56 PM  
7/2/2014

## Lampiran 32 Rekapitulasi Hasil Akhir Wajib Pajak

DATA AWAL PEMUTAKHIRAN OK 2014.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

Security Warning Automatic update of links has been disabled Enable Content

M1220 PINDAH KE PI Lt. 1

REKAPITULASI DATA HASIL AKHIR PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK DAERAH			
SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA PUSAT			
TAHAP II			
NAMA OUTLET	ALAMAT	PEMILIK	ALAMAT PEMILIK
YANI INTERNASIONAL HOTEL	RADEN SALEH NO. 35 CIKINI	YANI SUNARSO	JLN. MAWAR MERAH V/4 NO. 14
WISMA MALUKU	KEBON KACANG RAYA NO.20	JEMMY KWANNANDAR	JL. CIKINI RAYA NO. 60 BC
LAMPUNG	KEBON KACANG I/30	ABUBAKAR ABDULLAH K.KAC	KH. WAHID HASYIM NO. 63
TATOR HOTEL	JAKSA NO. 37	NY. IDA SYAMSIDAR	JL. H AGUS SALIM NO. 24
STUDIO ONE RUMAH KOS	TALANG BETUTU NO. 15	PT. STUDIO ONE	KRAMAT SENTIONG NO.1. 39
SMART HOTEL	JL. TANJUNG KARANG NO.2	PT. BEST HARVEST NUSANTARA	JL. KH. WAHID HASYIM NO. 69
SENIEN INDAH HOTEL	BUNGUR BESAR NO. 157	PT. HOTEL SENTRARIA ALIA SENIEN INDAH	JL. SUDIRMAN, PINTU I SENAYAN, FX RESIDENC
RUMAH KOS	LOMBOK NO. 57	VENTJE CHANDRAPUTRA	KEMAYORAN KETAPANG NO. 16
PURI KWITANG HOTEL	KRAMAT KWITANG I NO.11 A	PURI KWITANG HOTEL	PEGANGSAAN NO.2
PETAMBURAN I HOTEL / KALISMA	KS. TUBUN NO. 15-17	PT. SENIEN INDAH PLAZA	MH. THAMRIN KAV. 28-30, PLAZA INDONESIA
N 1 HOTEL	KS. TUBUN NO. 3	PT. HOTEL ROYAL VALINDO	GARUDA NO.8
MULIA SENAYAN HOTEL	ASIA AFRIKA, SENAYAN	PT. MULIA INTAN LESTARI	TAMAN PANTAI INDAH JAYA ANCOL
MENTENG II HOTEL	CIKINI RAYA NO. 105	PT. MENTENG SARANA WISATA	MUARA KARANG BLK E6 S NO.21
MEGA CIKINI HOTEL	CIKINI RAYA NO. 62 - 64	PT. CITRAPURI BHUMICKINI	JAKSA NO. 5
MAXIM HOTEL	KWITANG RAYA NO. 11	PT. HOTEL MAXIM ASRI	KAV PTB DKI BLOK C III/1 JAKARTA TIMUR
KRESNA HOSTEL	KEBON SIRIH TIMUR DALAM I NO.75	ZULFAHMI	KH. MAS MANSYUR NO.50
KERATON AT THE PLAZA A LUXURY COLLECTION	JL. MH. THAMRIN KAV. 15 THE PLAZA	PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBK	KEBON SIRIH BARAT DALAM NO. 35
KALI BARU WISMA	KALIBARU TIMUR III NO.36	MARIFAH	RADEN SALEH NO. 2
JOHNS PARDEDE INT'L HOTEL	RADEN SALEH I NO.37	PT. JHONNY PARDEDE / RONAL SITOMPUL	SALEMBA RAYA NO.26
JODI HOSTEL	JAKSA NO. 35	JODI HOSTEL	THAMRIN CITY LT 6 BLOK HT NO 1

DATA AWAL TAHAP 2 REKAP HASIL HOTEL (2) REKAP HASIL HOTEL REKAP TAHAP 1 REKAP TAHAP 2 (2) REKAP TAHAP 2 REI

Select destination and press ENTER or choose Paste

50%

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**PERDA PAJAK KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
12. Reklame *megatron/videotron/large electronic display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> (dua ratus centimeter persegi) per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung dipermukaan air.

## BAB II NAMA PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

## BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/slide; dan
  - j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya, tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
- e. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- f. penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
- g. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

## Bagian Kedua

### Subjek Pajak

#### Pasal 4

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.



Bagian Ketiga  
Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB IV  
DASAR PENGENAAN, TARIF,  
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai kontrak reklame.
  - b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor :
    1. jenis;
    2. bahan yang digunakan;
    3. lokasi penempatan;
    4. waktu;
    5. jangka waktu penyelenggaraan;
    6. jumlah, dan
    7. ukuran media reklame.



- c. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut :
  - a. Protokol A;
  - b. Protokol B;
  - c. Protokol C;
  - d. Ekonomi Kelas I;
  - e. Ekonomi Kelas II;
  - f. Ekonomi Kelas III;
  - g. Lingkungan.
- (5) Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik.
- (6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (5).
- (7) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar;
- (8) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 adalah ukuran dalam satuan luas/m<sup>2</sup> atau cm<sup>2</sup> media reklame yang terpasang.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung berdasarkan satuan Rupiah.
- (2) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut.

- a. untuk jenis reklame Papan / Billboard / Videotron/LED dan sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (m <sup>2</sup> )	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Papan/Billboard/ Videotron/LED dan Sejenisnya	Protokol A	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	25.000
	Protokol B	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	20.000
	Protokol C	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	15.000
	Ekonomi Kelas I	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	10.000
	Ekonomi Kelas II	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	5.000
	Ekonomi Kelas III	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	3.000
	Lingkungan	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	2.000

- b. untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (m <sup>2</sup> )	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Reklame Kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya	Protokol A	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	25.000
	Protokol B	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	20.000
	Protokol C	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	15.000
	Ekonomi Kelas I	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	10.000
	Ekonomi Kelas II	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	5.000
	Ekonomi Kelas III	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	3.000
	Lingkungan	1 m <sup>2</sup>	1 buah	1 hari	2.000

- (3) Untuk jenis reklame lainnya :

- a. Reklame melekat (stiker) :

Rp 5,00/cm<sup>2</sup> (lima rupiah per centimeter persegi) (sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

- b. Reklame selebaran :

Rp 500,00/lembar (lima ratus rupiah) per lembar sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

- c. Reklame berjalan/kendaraan :

Rp 5.000,00/m<sup>2</sup>/hari (lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.

- d. Reklame udara :  
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan.
  - e. Reklame Apung :  
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan.
  - f. Reklame suara :  
Rp 2.000,00/15 detik (dua ribu rupiah) per lima belas detik bagian waktu yang kurang dari 15 (lima belas) detik dihitung menjadi 15 (lima belas) detik.
  - g. Reklame film/slide :  
Rp 10.000,00/15 detik (sepuluh ribu rupiah) per lima belas detik, bagian waktu yang kurang dari 15 (lima belas) detik dihitung menjadi 15 (lima belas) detik.
  - h. Reklame peragaan :  
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan.
- (4) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (*indoor*) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
  - (5) NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
  - (6) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
  - (7) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (lima belas meter) yang pertama.
  - (8) Penetapan Nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  - (9) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau lebih dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Bagian Kedua  
Saat Terutang Pajak

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Terhadap Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 12



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Reklame.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Reklame telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Reklame semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan "tidak mendapatkan imbalan secara langsung" adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

#### Angka 12

Cukup jelas.

#### Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyelenggaraan reklame atau reklame sudah terselenggara adalah secara visual atau teks reklame sudah tertayang / terpasang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "reklame kain" adalah reklame berupa kain, antara lain dalam bentuk umbul-umbul dan spanduk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi menetapkan batasan ukuran reklame, maka sampai dengan batasan ukuran reklame yang ditetapkan dalam ketentuan dimaksud dikecualikan dari objek Pajak Reklame, ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.

Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tidak menetapkan batasan ukuran reklame, maka batasan ukuran reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame, luasnya tidak melebihi dari 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.

Ketinggian reklame dihitung dari permukaan tanah sampai dengan ambang bawah bidang reklame.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Nilai kontrak reklame" adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Faktor waktu untuk reklame Suara, Slide/Film dan sejenisnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Faktor jumlah untuk reklame Selebaran, Melekat, Stiker dan sejenisnya

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penyesuaian dan evaluasi ini perlu dilakukan dengan pertimbangan dari aspek tata ruang, pertumbuhan reklame, ketertiban umum dan arsitektur dan estetika kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "saat penyelenggaraan reklame" adalah saat visual atau teks reklame tertayang/terpasang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK HIBURAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung hiburan.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.

## **BAB II NAMA PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

**BAB III**  
**OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Objek Pajak**

**Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
  - j. pertandingan olahraga;
  - k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

**Bagian Kedua**  
**Subjek Pajak**

**Pasal 4**

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

**Bagian Ketiga  
Wajib Pajak**

**Pasal 5**

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**BAB IV  
DASAR PENGENAAN, TARIF,  
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

**Bagian Kedua  
Tarif Pajak**

**Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) sebesar 10%



(sepuluh persen).

- (8) Tarif pajak untuk permainan golf (green fee) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk driving range sebesar 10% (sepuluh persen).
- (9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh persen).
- (11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center sebesar 10% (sepuluh persen).
- (12) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen).
- (13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak**

#### **Pasal 8**

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### **Bagian Keempat Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 9**

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

## **BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK**

### **Bagian Kesatu Masa Pajak**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

## **Bagian Kedua Saat Terutangnya Pajak**

### **Pasal 11**

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

## **BAB VI TANDA MASUK**

### **Pasal 12**

- (1) Gubernur dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan.
- (2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang ditetapkan oleh Gubernur tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan pengesahan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Terhadap Pajak hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak hiburan.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2010  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HIBURAN

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Hiburan.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Hiburan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-masa dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah,

khususnya Pajak Hiburan dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif Pajak Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Hiburan telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hiburan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup Jelas.

#### Angka 2

Cukup Jelas.

#### Angka 3

Cukup Jelas.

#### Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

Angka 12

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan pagelaran kesenian adalah pagelaran berupa musik dan tari yang bersifat tradisional antara lain campur sari, keroncong, gambang kromong, musik melayu, jaipong, tari saman dan sejenisnya.
- Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan dan/atau dipertunjukan antara lain; renang, tenis, squash, futsal dan jenis olah raga lainnya, selain yang dimaksud pada huruf g dan huruf h.

Huruf k

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain; permainan yang menggunakan mesin keping (coin game machine), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

- Green fee adalah pembayaran terhadap penggunaan lapangan golf berikut fasilitas penunjang.
- Driving range adalah tempat untuk belajar/latihan memukul bola golf berikut fasilitas penunjang dengan dipungut bayaran.
- Fasilitas penunjang meliputi persewaan peralatan golf, car/bugy, caddy fee, pembayaran atas spa, massage dan restoran (tidak termasuk merchandise).

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
NOMOR 10





**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PAJAK HOTEL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dan Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5)
  19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
  20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dewan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel;

## BAB II

### NAMA PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

## BAB III

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Bagian Kesatu

##### Objek Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Bagian Kedua

##### Subjek pajak

#### Pasal 4

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### Bagian Ketiga

##### Wajib Pajak

## Pasal 5

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF,

### CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan Pajak

## Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Pajak

## Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Bagian Ketiga

#### Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Bagian Keempat

#### Wilayah Pemungutan

## Pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

## BAB V

### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Masa Pajak

## Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dan bulan dihitung satu bulan penuh.

## Bagian Kedua Saat Terutang Pajak

## Pasal 11

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2010  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010  
NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain

## Pajak Hotel.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Hotel, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Hotel telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hotel semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8  
Cukup jelas.  
Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)

Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain; Pusat Kebugaran (Fitness Center), Kolam renang, Tennis, Golf, Karaoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik dan sejenisnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel, untuk tamu hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

Contoh :

Pelayanan jasa transportasi yang disediakan hotel bekerja sama dengan perusahaan transportasi (taksi), dan hotel menerima pembayaran (bagian dari pembayaran dari pelayanan jasa transportasi tersebut).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK PARKIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);



21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.

## BAB II NAMA PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

## BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu Objek Pajak

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan

- asas timbal balik;
- d. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
  - e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

## Bagian Kedua Subjek Pajak

### Pasal 4

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

## Bagian kedua Wajib Pajak

### Pasal 5

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

## BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

## Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

## Bagian Kedua Tarif Pajak

### Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

### Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

#### Pasal 9

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

## BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

### Bagian Kesatu Masa Pajak

#### Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

### Bagian Kedua Saat Terutang Pajak

#### Pasal 11

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2010  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerah antara lain Pajak Parkir.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Parkir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Parkir dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Parkir telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajal dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat

dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Parkir semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8



Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan yang diusahakan atau berkaitan dengan pokok usaha termasuk jasa pengelolaan atau jasa penyediaan tempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh pemilik gedung kepada pihak ketiga.
- Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
- Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut bayaran.
- yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (pihak swasta) tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Sepanjang memungut bayaran baik harian maupun bulanan/langganan, tidak termasuk yang

dikecualikan dari Objek Pajak ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap penyelenggaraan parkir atas penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran bulanan/langganan yang pada umumnya pembayaran dilakukan dimuka oleh pengguna jasa parkir.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.



Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

## BAB II

### NAMA PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

## BAB III

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
  - b. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Bagian Kedua  
Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Bagian Ketiga  
Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB IV  
DASAR PENGENAAN, TARIF,  
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga  
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 11



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Restoran.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Restoran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Restoran telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Restoran semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan “tidak mendapatkan imbalan secara langsung” adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Yang dimaksud dengan “jasa boga” adalah usaha yang melayani dibidang makanan, hidangan dan santapan.

Yang dimaksud dengan “katering” adalah usaha yang melayani pesanan atau pemasok hidangan untuk pesta, pertemuan, dan sebagainya untuk keperluan pemesan.

#### Angka 11

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dikonsumsi ditempat lain" adalah termasuk pelayanan *take away/delivery order* (melalui pesanan, diantar atau dibawa pulang atau yang tidak dikonsumsi ditempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau katering, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "pembayaran atau seharusnya dibayar" adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.

Untuk usaha katering/jasa boga, pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha katering/jasa boga.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.